



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS KEBUTUHAN BELANJA DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DI KOTA TANJUNGPINANG

TESIS



**RANTI UTAMI
0821221014**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

**ANALISIS KEBUTUHAN BELANJA
DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
DI KOTA TANJUNGPINANG**

Oleh :
RANTI UTAMI,SE.Ak
0821220014

Dibawah Bimbingan
(Efa Yonedi,SE.MPPM,Ph.D.Ak dan Suhanda, SE.M.Si.Ak)

RINGKASAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. SPM bidang pendidikan tertuang didalam Kepmendiknas RI No.129a/U/2004. Untuk mencapai target SPM ini diperlukan alokasi anggaran yang memadai, untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap kebutuhan belanja dalam pencapaian SPM. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat permasalahan yang merupakan pembahasan pokok dalam tesis yaitu: (1) Bagaimana kinerja pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun yang dilaksanakan di Kota Tanjungpinang? (2) Berapa tingkat kebutuhan belanja dalam pencapaian SPM pendidikan dasar sembilan tahun di Kota Tanjungpinang?. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, menggunakan metode analisis data kualitatif dengan teknik analisis komparatif yaitu membandingkan antara kondisi kinerja pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan dengan indikator SPM. Dan untuk menghitung tingkat kebutuhan belanja pendidikan dasar didasarkan atas gap (kesenjangan) antara ketercapaian kinerja pendidikan dan SPM. Kebutuhan belanja dihitung hanya untuk indikator SPM yang belum tercapai.

Dari penelitian yang dilakukan memperoleh kesimpulan : Dari indikator SPM tingkat SD dan SMP, ada 4 indikator yang belum tercapai yaitu Angka Partisipasi Murni, pemenuhan sarana dan prasarana, kualifikasi guru menjadi S1 dan siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap. Dan untuk mencapai SPM pendidikan dasar sembilan tahun pemda Kota Tanjungpinang membutuhkan alokasi anggaran minimal sebesar Rp 43.686.246.500 pada setiap tahunnya diluar gaji pendidik dan anggaran untuk pendidikan tingkat atas serta biaya operasional untuk bidang pendidikan.

Keywords: Kebutuhan Belanja Pendidikan Dasar, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul :

**"ANALISIS KEBUTUHAN BELANJA
DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN DI KOTA TANJUNGPINANG"**

Adalah hasil kerja/ karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/ karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 04 September 2010
Yang membuat pernyataan

Ranti Utami

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 04 November 1977 di Tambelan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, sebagai anak ketiga dari pasangan Abah H.Taslim Abdullah dan Bunda Lasina Syamijan. Penulis memiliki seorang saudara perempuan Mbak Entien Utari, SPd. dan seorang saudara laki-laki Mas Tomi Pribadi. Penulis menempuh pendidikan pada SDN 002 pada tahun 1990, SMPN 3 tahun 1993 dan SMAN 1 pada tahun 1996 di kota Tanjungpinang. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru tahun 2000.

Dari tahun 2001 sampai sekarang penulis menjadi dosen tetap Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kejuruan (YPPK) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan pernah menjadi dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang serta menjadi staf pengajar LP3i Tanjungpinang. Pada tahun 2008 penulis mendapat tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan pada Universitas Andalas (Unand) Padang melalui BPPS.

KATA PENGANTAR

Allahdulillah puji dan syukur penulis kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Kebutuhan Belanja Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Tanjungpinang” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Sains Akuntansi pada Program Pascasarjana di Universitas Andalas.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas (Unand) Padang.
2. Efa Yonedi, SE, MPPM, PhD, Ak dan Suhanda, M.Si, Ak sebagai Komisi Pembimbing I dan II yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dari awal hingga selesainya penelitian dan penulisan tesis ini.
3. Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, sebagai Koordinator Program Studi S2 Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara.
4. Seluruh Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Magister Sains Akuntansi ini.
5. Seluruh staf Program Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan selama penulis mengikuti perkuliahan.

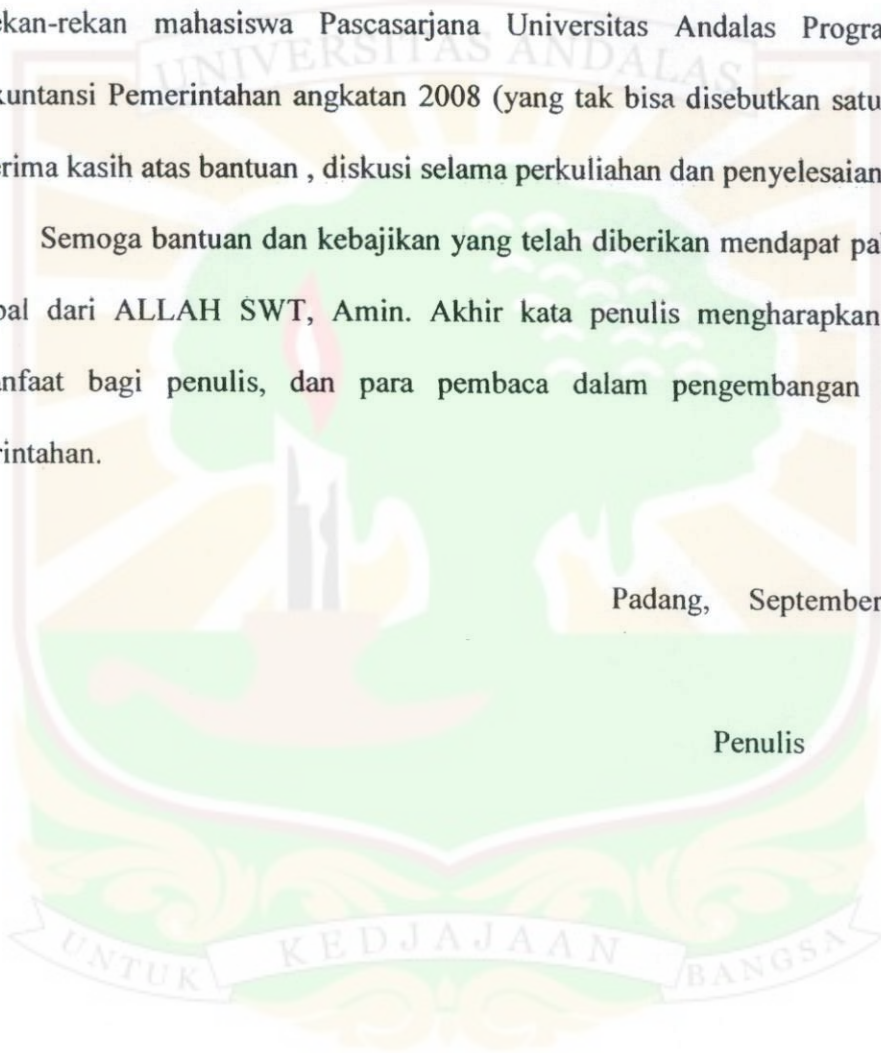
6. Jiwa-jiwa tersayang, “**Abah**” H. Taslim Abdullah dan “**Mom**” Lasina Syamijan, “**Mbak**” Entien Utari, SPd + Mas Ale, “**Mas**” Tomi Pribadi + Kak Nik dan ponaan-ponaan yang menggemaskan Mbak Oya, Mbak Ade, Ada “Band” dan Duta “Dutdut” serta si kecil “ Yaye”. Terima kasih untuk semua kasih sayang, do’a, kesabaran dan pengertiannya dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini.
7. Keluarga di Komplek Perla (Mama dan Papa), keluarga di Ciku dan keluarga di Tanjung Uban. Terima kasih atas dukungannya. Dan tak lupa juga buat keluarga di Tabing, Payakumbuh, Batusangkar dan Keluarga (K’Anda + B’Fi) terima kasih atas tumpangnya dan kemurahan hati yang diberikan kepada penulis.
8. Teristimewa untuk **Suami** tercinta dan tersayang “**Mas**” Yuritanto. Terima kasih untuk semua hati yang telah diberikan....semoga adek bisa menjadi istri dan bunda **juara satu sedunia...Amin.**
9. Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Kejuruan (YPPK) dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Tanjungpinang yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Beserta rekan-rekan seperjuangan di STIE Pembangunan Tanjungpinang yang selalu memberikan dukungan.
10. Adek-adek tersayang.....Icha maniez (katanya), Icca “Ijah”, Rani “Mahar” dan si bungsu Oji.....terimakasih untuk hari-hari bahagia selama di Padang...dan semua mimpi kita...pasti terwujud.....

11. Sahabat-sahabat terbaik : Rina (yang selalu menggoda untuk makan), Siska (yang selalu tergesa-gesa), Nia dan Rini (yang selalu kompak) dan Fiza (yang selalu rela memberikan tumpangan kamarnya). Terima kasih untuk persaudaraannya.
12. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas Program Studi Akuntansi Pemerintahan angkatan 2008 (yang tak bisa disebutkan satu persatu). Terima kasih atas bantuan , diskusi selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.

Semoga bantuan dan kebajikan yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dari ALLAH SWT, Amin. Akhir kata penulis mengharapkan tesis ini bermanfaat bagi penulis, dan para pembaca dalam pengembangan akuntansi pemerintahan.

Padang, September 2010

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Keuangan Daerah.....	11
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	13
2.1.3 Fungsi APBD.....	14
2.1.4 Struktur APBD.....	15
2.1.4.1 Pendapatan Daerah.....	19
2.1.4.2 Belanja Daerah.....	21
2.1.4.3 Pembiayaan Daerah.....	24
2.1.5 Orientasi Pembangunan Pendidikan.....	25
2.1.5.1 Pendidikan Dasar.....	29
2.1.5.2 Anggaran Pendidikan.....	29
2.1.6 Standar Pelayanan Minimal.....	31
2.1.6.1 Pengertian dan Kebijakan SPM.....	31
2.1.6.2 Prinsip-Prinsip SPM.....	35
2.1.6.3 SPM Bidang Pendidikan.....	36
2.1.7 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	37
2.1.7.1 Pengertian Kinerja.....	37

2.1.7.2 Indikator Kinerja.....	38
2.1.7.3 Pengukuran Kinerja.....	38
2.1.7.4 Pengukuran Kinerja Menurut PP RI No.6 Tahun 2008.....	40
2.2 Penelitian Terdahulu.....	42

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	48
3.2 Jenis Penelitian.....	48
3.3 Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	49
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	52
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.6 Metode Analisis.....	53

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang	56
4.1.1 Kondisi Geografis Dan Pemerintahan	58
4.1.2 Kondisi Ekonomi	61
4.1.3 Pembangunan Bidang Pendidikan	62
4.2 Hasil Penelitian	72
4.2.1 Kinerja Pelayanan Pendidikan	73
4.2.2 Analisis Gap (Kesenjangan) Pelayanan Pendidikan Dengan SPM ..	79
4.2.3 Analisis Program Bidang Pendidikan 2006-2009	98
4.2.4 Analisis Kebutuhan Belanja Dalam Pencapaian SPM	102

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	107
5.3 Keterbatasan	108
5.4 Implikasi Hasil Penelitian	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	17
Tabel 2.2	Indikator SPM Kepmendiknas RI No. 129a/U/2004.....	37
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel 4.1	Administrasi Pemerintahan Kota Tanjungpinang	60
Tabel 4.2	Keadaan Ekonomi Kota Tanjungpinang Tahun 2009	61
Tabel 4.3	Jumlah Sekolah, Siswa, Guru, Ruang Kelas Dan Rombel SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	64
Tabel 4.4	Rasio Kelas Terhadap Siswa SD/MI Di Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	65
Tabel 4.5	Rasio Guru Terhadap Siswa SD/MI Di Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	66
Tabel 4.6	Jumlah Sekolah, Siswa, Kelas dan Guru SD/MI Di Kota Tanjungpinang Tahun 2009	67
Tabel 4.7	Rasio Sekolah, Siswa, Guru, Kelas (Rombel), Tingkat SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2009.....	67
Tabel 4.8	Jumlah Sekolah, Siswa, Guru dan Kelas SMP/MTS Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	69
Tabel 4.9	Rasio Kelas Terhadap Siswa SMP/MTs Di Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	70
Tabel 4.10	Rasio Guru Terhadap Siswa SMP/MTs Di Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	70
Tabel 4.11	Jumlah Sekolah, Siswa, Kelas dan Guru SMP/MTs Di Kota Tanjungpinang Tahun 2009	71
Tabel 4.12	Rasio Sekolah, Siswa, Guru, Kelas (Rombel) Tingkat SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009	72
Tabel 4.13	Kinerja Pendidikan Dasar Indikator APK, APM Dan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	75
Tabel 4.14	Kinerja Pendidikan Dasar Indikator APK, APM dan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tanjungpinang Tahun 2009	77

Tabel 4.13	Kinerja Pendidikan Dasar Indikator APK, APM Dan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	75
Tabel 4.14	Kinerja Pendidikan Dasar Indikator APK, APM dan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tanjungpinang Tahun 2009	77
Tabel 4.15	Jumlah Sekolah, Ruang Kelas dan Fasilitas SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2009	82
Tabel 4.16	Jumlah Ruang Kelas, Perpustakaan dan Lapangan Olah Raga Tingkat SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Berdasarkan SPM.....	84
Tabel 4.17	Jumlah Sekolah, Ruang Kelas dan Fasilitas SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009	85
Tabel 4.18	Jumlah Ruang Kelas, Perpustakaan, Lapangan Olah Raga, UKS dan Laboratorium Tingkat SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Berdasarkan SPM	85
Tabel 4.19	Jumlah Kebutuhan Guru SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Berdasarkan Jumlah Sekolah Yang Ada Dibandingkan Dengan Jumlah Sekolah Menurut SPM	87
Tabel 4.20	Jumlah Kebutuhan Guru SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Berdasarkan Jumlah Sekolah Yang Ada Dibandingkan Dengan Jumlah Sekolah Menurut SPM	88
Tabel 4.21	Jumlah Guru SD/MI Kota Tanjungpinang Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2009	91
Tabel 4.22	Jumlah Guru SMP/MTs Kota Tanjungpinang Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2009	93
Tabel 4.23	Jumlah Lulusan dan Siswa Baru Tingkat I SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dan SMK Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	96
Tabel 4.24	Gap (Kesenjangan) Antara Kinerja Pelayanan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Dengan SPM..	98
Tabel 4.25	Kebutuhan Belanja Dalam Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Trend APK dan APM Tingkat SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	75
Gambar 4.2	Trend APK dan APM Tingkat SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	75
Gambar 4.3	Trend Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009	76
Gambar 4.4	APK dan APM Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009	78
Gambar 4.5	Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan bergulirnya era reformasi pada tahun 1998 yang membawa dampak sangat luas pada perubahan tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik bangsa Indonesia yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan hadirnya undang-undang ini, daerah memiliki otonomi luas untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Tentu saja arah dan pola pembangunan daerah tetap mendukung dan mengacu pada pedoman, arah dan haluan pembangunan nasional yang telah dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Adapun dalam penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 yang di ubah dengan UU No.32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya pada pasal 167 ayat (2) menjelaskan tentang perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Jika kita cermati tentang maksud pemberian otonomi daerah, untuk dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan dan peningkatan partisipasi masyarakat, maka terkandung tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah, 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002)

Dengan penjelasan pasal 167 ayat (2) diatas, bahwa salah satu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat adalah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, artinya bahwa pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendidikan masyarakat baik dari aspek kesejahteraan masyarakat maupun dari aspek pelayanan umumnya.

Secara politis tekad pemerintah untuk membangun pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyat terlihat cukup jelas. Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, bahkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan untuk itu pemerintah bertanggung jawab membiayainya. Melalui perubahan Pasal 31 UUD 1945, tekad tersebut makin diperkuat dengan adanya ketentuan bahwa negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran dan pendapatan dan belanja negara (APBN). Prosentase yang sama juga dimandatkan untuk dialokasikan oleh setiap daerah dalam anggaran dan belanja daerah (APBD) masing-masing. Secara sederhana, makin besar penerimaan negara dan daerah makin besar alokasi dana untuk bidang pendidikan. Dimana angka minimal 20% tersebut tidak termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan (UU No.20 tahun 2003, Pasal 49).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terdiri dari SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Jadi pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di SD/MI dan tiga tahun di SMP/MTs. Tujuan pendidikan dasar adalah mengajarkan kecakapan dasar, seperti membaca, menulis dan berhitung yang merupakan penunjang utama pengajaran pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Pencapaian pembangunan pendidikan dasar di Indonesia secara kuantitas dapat dilihat dari beberapa indikator seperti angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), angka drop out (DO) dan angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun nampaknya masih belum optimal. Hal itu terlihat dari angka tidak melanjutkan bagi tamatan SD/MI selama tiga tahun terakhir yang besarnya sekitar 20% (Tayomah dan Usman : 2004)

Selain itu kondisi pendidikan dasar di Indonesia dari hasil penelitian (Tayomah dan Usman : 2004) menunjukkan, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang menjadi prasyarat terselenggaranya pendidikan yang baik juga masih terbatas dan bahkan cenderung memburuk. Hal ini antara lain dapat dilihat dari adanya 58% ruang kelas SD, baik milik pemerintah maupun swasta, dalam keadaan rusak. Selain itu kurangnya jumlah tenaga, rendahnya kualitas dan tidak meratanya ketersebaran tenaga guru, masih merupakan permasalahan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, tuntutan makin berat bagi penyelenggara pelayanan pendidikan saat ini.

Usaha pemerintah lainnya dalam membangun pelayanan pendidikan yaitu dengan menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan, antara lain adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Minimal dan Kepmendiknas No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional. Dengan adanya PP No. 65 Tahun 2005 dan Kepmendiknas No 129a/U2004 maka pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai kewenangan wajib dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten/kota terhadap pelayanan di bidang pendidikan kepada publik.

Standar pelayanan minimum pendidikan merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Seberapa besar tingkat kesesuaian antara pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan standar pelayanan minimum yang harus ada dapat dijadikan indikator

untuk mengukur kinerja pendidikan yang pada akhirnya dapat melahirkan program-program pendidikan yang lebih baik.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Tapi kenyataannya tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan walaupun pemerintah selalu mendengung-dengungkan untuk pendidikan dasar bebas dari biaya pendidikan alias sekolah gratis. Untuk itu konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD, agar masyarakat dapat menerima pelayanan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Seharusnya dengan adanya ketentuan ini memberikan jaminan ada alokasi anggaran yang pasti digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Tapi dalam prakteknya pemerintah tidak memiliki kekuatan keuangan yang cukup sehingga alokasi tersebut dicicil dengan komitmen peningkatan alokasi tiap tahunnya.

Dengan rendahnya alokasi anggaran tentu akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan, yang pada akhirnya tidak akan tercapainya standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah di bidang pendidikan. Seharusnya pemerintah daerah mampu membuat program-program pembangunan pendidikan yang dijabarkan melalui renstra dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimal tersebut.

Perumusan program pembangunan pendidikan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan dan oleh pemerintah. Selama ini kekurangan atau keterbatasan dana selalu menjadi alasan klasik dari lambatnya kemajuan pembangunan pendidikan. Tapi banyak pihak yang berpendapat bahwa keterbatasan anggaran seharusnya tidak selalu dijadikan

alasan. Hal yang lebih penting adalah perlu adanya ketegasan dan kemauan kuat dari aparat pemerintah untuk melaksanakan keputusan politik di bidang pendidikan, sebagaimana yang telah tercantum dalam UUD dan peraturan-peraturan lainnya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya meningkatkan pelayanan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari struktur perencanaan pendidikan yang dituangkan dalam RPJMD Kota Tanjungpinang, Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Rencana Kerja Tahunan di bidang pendidikan yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada kenyataannya meskipun alokasi anggaran pendidikan pada APBD meningkat setiap tahunnya yaitu untuk tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 masing-masing sebesar 19,26%, 24,28%, 25,99% dan 25,65 tapi belum dialokasikan sebesar 20% diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dari APBD dan anggaran pendidikan tersebut tidak sesuai dengan besaran belanja dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimum. Persentase peningkatan capaian target rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), sebagai bagian indikator keberhasilan kinerja pendidikan lebih kecil dari persentase peningkatan alokasi anggaran dan tidak berbanding dengan hasil yang diharapkan. Penyebabnya diduga alokasi pembiayaan pendidikan salah sasaran atau tidak mengacu pada standar yang hendak dicapai. Dan kebutuhan belanja pendidikan yang dianggarkan tidak sesuai dengan sasaran atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Untuk itu perlu adanya analisa atas kebutuhan belanja pendidikan agar jumlah anggaran yang ditetapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan profil pendidikan Kota Tanjungpinang tahun 2009, pelayanan pendidikan yang telah dapat dilaksanakan diilustrasikan sebagai berikut, apabila dipandang dari segi pemerataan, untuk pendidikan dasar dan menengah dengan indikator APK dan APM, untuk APK sekolah dasar dan sekolah menengah yaitu 101,72% dan 93,36%. Dan untuk APM masing-masing 84,21% dan 60,91%. Hal ini menunjukkan belum semua anak usia sekolah (13-15) mengenyam pendidikan SMP dan masih perlu diupayakan peningkatan pemerataan pendidikan. Apabila dipandang dari segi peningkatan mutu dengan indikator angka putus sekolah pendidikan dasar dan menengah yaitu 0,05% dan 0,09%, persentase angka kelayakan guru mengajar dengan klasifikasi S1 di tingkat SD dan SMP masing-masing 14,77% dan 49,10%.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan pendidikan, antara lain dilakukan oleh : Isdijoso dan Wibowo (2002); Tayomah dan Usman (2004); Prasajo, Kurniawan dan Hasan (2005); Steer (2005); dan; Fatimah (2009). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isdijoso dan Wibowo (2002) didapatkan kesimpulan bahwa DAU tahun 2001 merupakan penyangga utama pembiayaan APBD, yang berdampak pada bergesernya alokasi anggaran pembangunan, tidak terkecuali anggaran sektor pendidikan untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin.

Tayomah dan Usman (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa penetapan besarnya anggaran program pembinaan pendidikan dasar (SDN) sepenuhnya menjadi kewenangan pemda. Oleh karena itu, antara satu daerah dengan daerah lain terdapat bentuk program dan alokasi anggaran yang bervariasi. Sebagian besar anggaran program pembinaan digunakan untuk pembangunan atau pengembangan SD/MI yang lebih bersifat fisik.

Kemudian Prasejo, Kurniawan dan Hasan (2005), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kunci semua keberhasilan dalam pelaksanaan program-program inovasi di Kabupaten Jembrana adalah adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana Khususnya Bupati untuk selalu meningkatkan perbaikan pelayanan masyarakat dan efisiensi penggunaan anggaran dalam semua sektor pembangunan. Keberhasilan dicapai dengan program efisiensi anggaran sehingga anggaran yang terbatas dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Steer (2005) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan, pendidikan dan infrastruktur selalu berada dibawah rata-rata nasional, terutama karena layanan publik tidak menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan termiskin di Papua. Walaupun ada dana otonomi khusus namun penganggaran lebih difokuskan untuk belanja rutin sehingga belanja pelayanan publik tetap terabaikan.

Kemudian, Fatimah (2009) menemukan bahwa pemerintah daerah Payakumbuh pada Dinas Pendidikan alokasi terbesar belanja adalah untuk belanja non-Modal untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang belum mendukung peningkatan kinerja, sedangkan alokasi belanja Dinas Kesehatan alokasi terbesar juga pada belanja non-Modal yang dialokasikan untuk belanja langsung yang terkait dengan pelaksanaan program. sehingga kinerja pelayanan kedua dinas ini cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan Undang-undang Otonomi daerah dan aturan-aturan regulasi pelaksanaannya tentang pendidikan serta penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka tesis ini bertujuan untuk menganalisis gap (kesenjangan) antara kinerja pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun dengan standar pelayanan minimum

dan mengidentifikasi kebutuhan belanja dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar sembilan tahun di kota Tanjungpinang.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kinerja pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun yang dilaksanakan di kota **Tanjungpinang** ?
- b. Berapa tingkat kebutuhan belanja dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar sembilan tahun di kota **Tanjungpinang**?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis gap antara kondisi kinerja pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun yang telah dilaksanakan di kota Tanjungpinang dengan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi.
- b. Menganalisis tingkat kebutuhan belanja dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar sembilan tahun di kota Tanjungpinang.

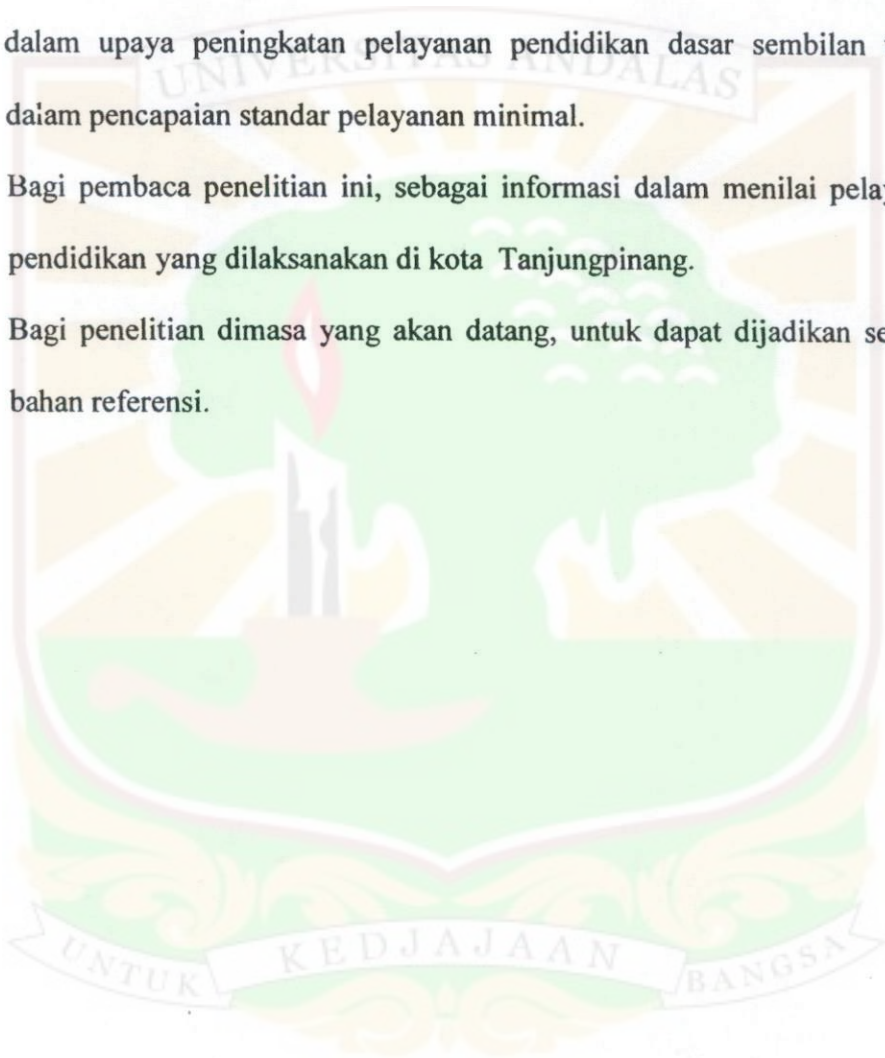
1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, untuk menemukan bukti empiris tentang kondisi pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun yang dilaksanakan di kota Tanjungpinang

dan mengetahui tingkat kebutuhan belanja dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar sembilan tahun yang harus dianggarkan oleh Pemda kota Tanjungpinang.

- b. Bagi Pemda Kota Tanjungpinang, untuk dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun dalam pencapaian standar pelayanan minimal.
- c. Bagi pembaca penelitian ini, sebagai informasi dalam menilai pelayanan pendidikan yang dilaksanakan di kota Tanjungpinang.
- d. Bagi penelitian dimasa yang akan datang, untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Lahirnya otonomi daerah telah memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Sumber-sumber Penerimaan lainnya. Untuk itu kebijaksanaan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien. Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Usman (1998: 63) mengatakan salah satu

kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan "*self supporting*" dalam bidang keuangan. Halim (2007: 230) mengungkapkan bahwa kemampuan pemda dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995: 16).

Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*publik goods*) dan jasa pelayanannya. Menurut Kunarjo (1996: 181) bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana, pemerintah daerah dapat membiayai dari sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah.

Menurut Halim (2004 : 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari : ”
Keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam kekayaan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang investaris milik

daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)".

2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Yuwono (2005 : 92), APBD didefinisikan sebagai "Suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang disetujui oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005, Bab 1 pasal 1 ayat 7 APBD didefinisikan sebagai "Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah". Pengelolaan APBD dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD), yang juga bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sebagai dasar penyusunan APBD digunakan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (14) di jelaskan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah."

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab III Pasal 15 dapat dijelaskan azas umum APBD, yaitu :

- a. APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

- b. Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- d. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam satu tahun anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi:

- a. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.3. Fungsi APBD

APBD yang dianggarkan untuk mendukung jalannya pemerintahan di daerah memiliki berbagai macam fungsi. Mardiasmo (2002 : 63), mengungkapkan ada beberapa fungsi utama anggaran sektor publik, yaitu:

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*)
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*)
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)
- d. Anggaran sebagai alat politik (*political tool*)

- e. Anggaran sebagai alat Koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*)
- f. Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*) dan
- g. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang public (*public sphere*)

Sedangkan menurut Indra Bastian (2006 : 164), anggaran berfungsi sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- c. Anggaran sebagai alat komunikasi intren yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
- e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
- f. Anggaran merupakan instrumen politik, dan
- g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2.1.4. Struktur APBD

Pasca reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD yang pertama didasari oleh keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sejalan dengan perubahan yang terjadi bentuk APBD sekarang didasarkan pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 (Halim : 2007). Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 13/2006 Pasal 22 Ayat (1) terdiri dari 3 bagian , yaitu; Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu dalam bentuk yang baru APBD terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak pemda, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak pemda. Selain itu dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran (Halim, 2007)

Menurut Kumorotomo dan Purwanto dalam Abdullah (2005), struktur APBD tersebut merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah ini dirinci menurut kelompok pendapatanyang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah. Belanja dikelompokkan menjadi belanja aparatur, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak tersangka.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan

meliputi transaksi keuangan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Terjadinya surplus apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah, sedangkan defisit apabila pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Adanya surplus anggaran kemudian dapat dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah. Apabila terjadi defisit akan dibiayai dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan dan jenis penerimaan daerah (Halim, 2007).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 2.1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Bagian APBD	Rincian APBD
1	Pendapatan	<p>1. Pendapatan Asli Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan pajak daerah b. Pendapatan retribusi daerah c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah <p>2. Pendapatan Transfer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) dana bagi hasil pajak 2) dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) 3) dana alokasi umum 4) dana alokasi khusus b. <i>Transfer pemerintah pusat lainnya:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) dana otonomi khusus 2) dana penyesuaian c. <i>Transfer pemerintah provinsi</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) pendapatan bagi hasil pajak

		2) pendapatan bagi hasil lainnya 3. Lain-lain Pendapatan Yang sah a. pendapatan hibah b. pendapatan dana darurat c. pendapatan lainnya
		JUMLAH
2	Belanja	1. Belanja Operasi: a. belanja pegawai b. belanja barang c. belanja bunga d. belanja subsidi e. belanja hibah f. belanja bantuan sosial g. belanja bantuan keuangan 2. Belanja Modal: a. belanja tanah b. belanja peralatan dan mesin c. belanja gedung dan bangunan d. belanja jalan, irigasi dan jaringan e. belanja aset tetap lainnya f. belanja aset lainnya 3. Belanja Tidak Terduga: a. belanja tidak terduga 4. Transfer: a. transfer bagi hasil ke desa: 1) bagi hasil pajak 2) bagi hasil retribusi 3) bagi hasil pendapatan lainnya
		JUMLAH
		SURPLUS/(DEFISIT)
3	Pembiayaan	1. Penerimaan Daerah: a. Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) b. Pencairan dana cadangan c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Penerimaan pinjaman daerah e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah g. Penerimaan piutang daerah 2. Pengeluaran Daerah: a. pembentukan dana cadangan b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah c. pembayaran pokok utang d. pemberian pinjaman daerah
		JUMLAH
		Pembiayaan Neto
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA)

Sumber: Permendagri No.13 tahun 2006

2.1.4.1. Pendapatan Daerah

Halim (2007) mendefinisikan dan mengelompokkan pendapatan menjadi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah "Pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan".

Sedangkan menurut Abdul Halim (2007), dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah" beliau menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu;

- a. Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak
- b. Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
 - 1). Bagian laba perusahaan milik daerah
 - 2). Bagian laba lembaga keuangan bank
 - 3). Bagian laba lembaga keuangan non bank
 - 4). Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

d. Lain-Lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1). Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2). Penerimaan Jasa giro
- 3). Penerimaan bunga deposito
- 4). Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 5). Penerimaan ganti rugi atas kerugian /kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR)

Sumber PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakannya otonomi daerah tersebut secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang (Mamesah, 1995, dalam Abdullah dan Halim, 2003).

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah kelompok pendapatan yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya, yang terdiri dari: Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi.

Di Indonesia, seperti ditegaskan dalam UU No. 25/1999, bentuk transfer yang paling penting adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu,

tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat dan Daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian daerah (Abdullah dan Halim, 2003).

3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 28, dinyatakan bahwa kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam;
- c. Dana bagi hasil dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah ;
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.1.4.2. Belanja Daerah

Menurut Kepmendagri No. 29 tahun 2002, belanja daerah adalah "semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan".

Dalam UU No. 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa belanja dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai dan atas beban APBN.

Belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Deddi Nordiawan (2007 : 32), secara umum anggaran belanja pemerintah dapat disusun dengan dua pilihan struktur atau klasifikasi, yaitu klasifikasi ekonomis dan klasifikasi fungsional. Klasifikasi ekonomis dibuat berdasar jenis-jenis belanja yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelayanan publik, sedangkan klasifikasi fungsional menyediakan informasi berdasarkan tujuan atau fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Klasifikasi ekonomi untuk belanja meliputi: kompensasi untuk pegawai (upah dan gaji dan tunjangan); belanja barang dan jasa; penggunaan aset tetap; bunga; subsidi; hibah; tunjangan sosial dan; belanja lain-lain. Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan fungsi meliputi: pelayanan umum; pertahanan; ketertiban umum; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas masyarakat; kesehatan; pariwisata, budaya, dan agama; pendidikan dan; jaminan sosial.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. (PP Nomor 24 Tahun 2005).

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk memperoleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. (PP Nomor 24 Tahun 2005). Sedangkan menurut Abdullah (2008) belanja modal adalah belanja yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset pemerintah, yakni peralatan, bangunan dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun, untuk kasus dipemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli.

3. Belanja Lain-lain/ Tak Terduga

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan belanja lain-lain/ tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah transfer keluar yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah

2.1.4.3. Pembiayaan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Menurut Halim (2007), anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan neto.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Atau dengan kata lain pengeluaran pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk pengalokasian surplus anggaran.

3. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

2.1.5. Orientasi Pembangunan Pendidikan

Pendidikan adalah satu investasi sumber daya manusia (SDM) yang penting. Untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah tinggi, seseorang membutuhkan ketrampilan (skill) yang memadai. Ketrampilan yang memadai dapat diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan juga merupakan elemen penting dalam rangka memerangi kemiskinan, memberdayakan wanita, dan menyelamatkan anak-anak dari berbagai upaya eksploitasi (UNICEF).

Dan pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai bangsa yang maju mandiri dan beradab. Pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja Pemerintah. Menyadari akan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan hidup bangsa pada seluruh tingkatan baik pusat maupun daerah (kabupaten/kota).

Berdasarkan Pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa "Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pembangunan pendidikan diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Manusia

membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Elfindri (2001:53) mengungkapkan bahwa investasi modal manusia akan menghasilkan manfaat, baik untuk individu maupun manfaat sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat yang diterima oleh masyarakat adalah peningkatan produksi agregat termasuk diantaranya keuntungan eksternalitas. Pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan akan menghasilkan suatu tingkat pengembalian tertentu.

Fattah (2002:89), juga mengatakan bahwa salah satu tujuan kebijakan pembangunan pendidikan nasional adalah mengurangi kesenjangan sosial yang selalu terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas tenaga kerja terdidik.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi

pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggungjawab. Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
- b. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
- c. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- d. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
- e. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
- f. Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
- g. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
- h. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
- i. Pelaksanaan wajib belajar .
- j. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
- k. Pemberdayaan peran masyarakat.
- l. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat.
- m. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk mendukung visi dan misi diatas diperlukan ketersediaan dana yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) dijelaskan bahwa” Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

2.1.5.1. Pendidikan Dasar

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terdiri dari SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Jadi pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di SD/MI dan tiga tahun di SMP/MTs. Tujuan pendidikan dasar adalah mengajarkan kecakapan dasar, seperti membaca, menulis dan berhitung yang merupakan penunjang utama pengajaran pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Pendidikan dasar memberikan kecakapan yang diperlukan generasi muda sehingga mereka mampu menentukan pilihan yang rasional, hidup bertanggungjawab, dan hidup sehat. Pengetahuan dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai perbedaan dan memperbaiki dialog antar kultur.

Pencapaian pembangunan pendidikan dasar di Indonesia secara kuantitas dapat dilihat dari beberapa indikator seperti angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), angka drop out (DO) dan angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs.

2.1.5.2. Anggaran Pendidikan

Kondisi mahal biaya pendidikan yang terjadi menyebabkan tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan. Hal inilah yang mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945 melalui perubahan pasal 31. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah dalam kebijakan anggaran

pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Prosentase yang sama juga dimandatkan untuk dialokasikan oleh setiap daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing. Hal ini dimaksud agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan khususnya pendidikan dasar.

Dengan ketentuan ini akan memberikan jaminan bahwa ada alokasi anggaran yang pasti digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah tidak punya kemampuan keuangan yang memadai sehingga alokasi tersebut dicicil dengan komitmen peningkatan alokasi tiap tahunnya. Dua studi di Amerika Latin dan India baru-baru ini mampu menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berupa alat pembelajaran, buku dan laboratorium dicatat sebagai kebijakan anggaran yang lebih besar manfaatnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan (World Bank, 2004 : 116 dalam Elfindri 2006).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo:2005). Dan anggaran merupakan alat bagi manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan keuangan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan program. Dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka standar bermanfaat sebagai alat mengukur efisiensi dikaitkan dengan realisasi biaya yang melampaui dari jumlah yang dianggarkan.

Banyak dasar yang bisa digunakan dalam mengukur kinerja pembiayaan/ penganggaran pendidikan, yaitu:

- a. Bagaimana anggaran pendidikan mendukung manajemen berbasis sekolah (MBS). Anggaran pendidikan dapat dikatakan mendukung MBS jika pengelolaan anggaran membuat sekolah leluasa dalam mengalokasikan sumber daya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, menyederhanakan birokrasi, meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan.
- b. Bagaimana anggaran pendidikan mendukung norma-norma yang diusung oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran yang mendukung norma-norma Sisdiknas adalah anggaran yang mampu pemeratakan pelayanan pendidikan yang bermutu, mengalokasikan dana untuk orang miskin, menyeimbangkan kesempatan mencapai tujuan pendidikan dan mengelola pendidikan. Selain itu juga mampu mengalokasikan dana dan sumber daya secara efisien dan berkeadilan, membuat pengelolaan pendidikan transparan dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.

2.1.6. Standar Pelayanan Minimal

2.1.6.1. Pengertian dan Kebijakan SPM

Standar Pelayanan Minimal atau yang lebih dikenal dengan istilah SPM merupakan ketentuan atau kebijakan publik mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Kebijakan ini digulirkan bersamaan dengan reformasi tatanan politik pemerintahan sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang diatur Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Pasal

11 Ayat (4) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam ketentuan umum pasal 1 Ayat (6) menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Menurut Oentarto, dkk (2004:173) bahwa standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai strategis tersebut yaitu:

- a. Bagi pemerintah daerah: SPM dapat dijadikan sebagai tolak ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan.
- b. Bagi masyarakat: SPM dapat dijadikan acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Penerapan SPM ini harusnya dapat menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu sebaiknya dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian (PP No.65/2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal)

Pengertian SPM dapat dijumpai pada beberapa sumber, antara lain :

- a. Undang-Undang 32 tahun 2004 penjelasan pasal 167 (3), menyatakan bahwa SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 20 (1) b menyatakan bahwa APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; Ayat (2) menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.
- c. Lampiran Surat Edaran Dirjen OTDA Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002 menyatakan Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- d. PP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan standar Pelayanan Minimal **mendefinisikan** Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang **jenis** dan **mutu** pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- e. Permendagri No. **6 tahun 2007** tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal, menjelaskan Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan

Dari berbagai pengertian tersebut, secara umum dapat diikhtisarkan bahwa SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh

pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya SPM akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kuantitas dan atau kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pelaksanaan urusan wajib merupakan pelayanan minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa, SPM ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini departemen teknis, sedangkan pedoman penyusunan SPM ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu Permendagri No. 6 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal.

Penerapan SPM ini harusnya dapat menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu sebaiknya dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian (PP No.65/2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal)

Selanjutnya pelaksanaan PP ini antara lain dimaksudkan untuk:

- a. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah dengan mutu tertentu.

- b. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat dijadikan dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah.
- c. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari maksud pelaksanaan SPM menurut PP No.65 Tahun 2005, maka SPM memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik.
- c. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja.
- d. Masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

2.1.6.2. Pinsip-Prinsip SPM

Beragamnya kondisi daerah, baik kondisi ekonomi, sosial, budaya, maupun kondisi geografis akan berdampak pada kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mengimplementasikan SPM. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam penerapan SPM perlu dipahami.

Didalam PP N0.65 Tahun 2005 Bab III Pasal 3 menyatakan prinsip-prinsip SPM sebagai berikut:

- a. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
- b. SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- d. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
- e. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

2.1.6.3. SPM Bidang Pendidikan

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Standar pelayanan minimal bidang pendidikan tertuang didalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang terdiri dari XIII bab. Dan menurut Kepmendiknas ini dalam Bab III ada 9 kriteria yang harus dipenuhi sebagai Standar Pelayanan Minimal pendidikan SD/MI dan 10 kriteria untuk pendidikan SMP/MTs, seperti terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Indikator SPM Kepmendiknas RI Nomor 129a/U/2004

NO	INDIKATOR SPM	SD/MI	SMP/MTs
1	APM	95 %	90 %
2	APS (Angka Putus Sekolah)	≤ 1 %	≤ 1 %
3	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90 %	90 %
4	Memiliki tenaga kependidikan non guru	-	80 %
5	Jumlah guru yang diperlukan terpenuhi	90 %	90 %
6	Kualifikasi guru S1	90 %	90 %
7	Siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap	95 %	100 %
8	Jumlah siswa per kelas	30 – 40	30 – 40
9	% Siswa dengan nilai memuaskan dalam uji sampel mutu pendidikan	90 %	90 %
10	Lulusan melanjutkan ke jenjang berikutnya	95 %	70 %

Sumber : Kepmendiknas RI No. 129a/U/2004

Jika diperhatikan dari sepuluh indikator SPM tersebut, tidak sepenuhnya mewakili indikator input, proses dan output pendidikan. Sebagian besar indikator yang ada lebih berorientasi pada indikator input pendidikan. Disamping itu target SPM tidak membedakan atau menyamaratakan kemampuan serta kondisi setiap daerah, sehingga sebagian daerah akan menganggap target yang harus dipenuhi terlalu tinggi sedangkan sebagian daerah lainnya yang lebih maju akan menganggap target yang harus dicapai terlalu rendah.

2.1.7. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.1.7.1. Pengertian Kinerja

Menurut Mahsun (2006 : 25), kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedangkan menurut Wiloyo (2007), kinerja merupakan sesuatu yang dicapai, kemampuan kerja (tentang peralatan) atau prestasi yang diperlihatkan.

2.1.7.2. Indikator Kinerja

Menurut Indra Bastian (2006 : 267), Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impact). Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dan indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.1.7.3. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur efektifitas kerja suatu organisasi perlu dilakukan pengukuran atas pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dilaksanakan pada organisasi tersebut. Pengukuran kinerja (performance measurement) menurut Roberston (2002) dalam Mahsun (2006 : 25) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik

barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sedangkan pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2002) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu menejer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Hampir serupa dengan pengertian diatas Mahsun (2006) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Sementara menurut Lohman (2003) dalam Mahsun (2006 : 25), pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

Berdasarkan berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
- b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
- c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran –sasaran organisasi
- d. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas)

2.1.7.4 Pengukuran Kinerja Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008.

Sasaran utama diberlakukannya otonomi daerah adalah supaya daerah dapat mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 memberikan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak.
- b. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk.
- c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistimatis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 untuk indikator kinerja Dinas pendidikan sebagai berikut:

- a. Angka melek huruf

Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

b. Angka partisipasi kasar

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

c. Angka partisipasi murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

d. Angka partisipasi sekolah (dasar)

Angka partisipasi sekolah (Dasar) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun) yang menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

e. Angka partisipasi sekolah (menengah)

Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16 – 18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

f. Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.

- g. Angka Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan analisa belanja dan kinerja pemerintah daerah pada era otonomi daerah dalam bidang pelayanan pendidikan juga telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tersebut meskipun dengan permasalahan yang hampir sama, tetapi hasilnya relatif berbeda.

Isdijoso dan Wibowo (2002) berdasarkan penelitiannya memperoleh gambaran bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2001 di Kota Surakarta yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk membiayai belanja rutin, terutama belanja pegawai akibat adanya pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) dari instansi vertikal kepada pemerintah daerah, sehingga pengeluaran rutin untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai membengkak. Hal ini membawa dampak pada bergesernya alokasi anggaran pembangunan, tidak terkecuali anggaran sektor pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin.

Tayomah dan Usman (2004) menemukan bahwa penetapan besarnya anggaran program pembinaan pendidikan dasar (SDN sepenuhnya menjadi kewenangan pemda). Oleh karenanya, antara satu daerah dengan daerah lain *terdapat bentuk program dan alokasi anggaran yang bervariasi*. Sebagian besar anggaran program pembinaan digunakan untuk pembangunan atau pengembangan SD/MI yang lebih bersifat fisik. Akibatnya, pembiayaan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar cenderung rendah. Kemudian dilihat dari keterkaitan

antara rumusan visi dan misi daerah dengan alokasi anggarannya, sebagian besar daerah sampel tidak secara konsisten mengaitkan antara keduanya. Daerah yang secara tegas menyebut "pendidikan" dalam visi dan misinya, ternyata tidak satupun menempatkan sektor pendidikan kedalam tiga besar penerimaan anggaran pembangunan. Sebaliknya, kabupaten Lombok Barat dan Kota Pasuruan yang tidak menyebut secara tegas sektor "pendidikan" dalam visi dan misinya, justru menempatkan sektor pendidikan kedalam tiga besar penerima anggaran pembangunan.

Dalam penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan pendidikan dasar di era otonomi daerah cenderung menurun dengan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta rendahnya kualitas dan terbatasnya tenaga pengelola dan pelaksana dengan ketersebaran yang tidak merata. Dan hanya sebagian kecil saja daerah (kabupaten/kota) yang telah mampu mengalokasikan dana pendidikan di luar belanja pegawai lebih dari 20%, sebagian besar daerah hanya mampu mengalokasikan kurang dari 10%. Dengan demikian pendidikan di Indonesia menghadapi dilema terbatasnya anggaran disatu pihak dan tuntutan peningkatan mutu di lain pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata sepertiga dari APBD kabupaten/kota sampel dialokasikan untuk sektor pendidikan. Anggaran sudah besarnya alokasi anggaran daerah untuk sektor pendidikan harus diklarifikasi secara jelas dan transparan, bahwa sebagian besar anggaran (sekitar 90%) hanya untuk belanja pegawai/guru. Dan temuan lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dan besaran dana untuk pendidikan dasar sangat bervariasi, baik antar daerah maupun antar sekolah di satu daerah, bahkan ada kecenderungan sekolah (SDN) yang kaya memperoleh dana operasional yang lebih besar, sebaliknya sekolah yang miskin memperoleh dan operasional yang

kecil. Hal ini menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan mutu pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya di satu daerah.

Kemudian Prasojo, Kurniawan dan Hasan (2005), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kunci semua keberhasilan dalam pelaksanaan program-program inovasi di Kabupaten Jembrana adalah adanya komitmen pemerintah Kabupaten Jembrana khususnya Bupati untuk selalu meningkatkan perbaikan pelayanan masyarakat dan efisiensi penggunaan anggaran dalam semua sektor pembangunan. Program efisiensi anggaran menjadi begitu pentingnya mengingat kemampuan keuangan yang terbatas dari Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam membiayai program-program inovasi yang cenderung Cost centered tersebut. Karenanya, dalam pembiayaan program-program inovasi sangat tergantung dari keberhasilan pemerintah kabupaten Jembrana dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran di semua sektor pembangunan. Hasil efisiensi tersebut untuk selanjutnya akan digunakan untuk mensubsidi program-program inovasi yang ada.

Menyadari kemampuan keuangan daerah yang terbatas, pemerintah kabupaten Jembrana dituntut untuk memiliki strategi dengan mengarahkan program inovasi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dengan mengurangi subsidi. Dalam bidang pendidikan misalnya, harus ada strategi subsidi silang (cross subsidy) dari siswa dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi kepada siswa dengan tingkat ekonomi yang lemah. Dalam bidang kesehatan, subsidi JKJ harus dapat diganti dengan premi yang dibayarkan sendiri oleh masyarakat. Untuk itu, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap program menjadi penting, karena dalam jangka panjang program-program tersebut diarahkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Sehingga bantuan pendidikan, kesehatan,

dan dana bergulir misalnya, hanya merupakan stimulus untuk menuju kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli. Sebaliknya, pemahaman masyarakat yang salah terhadap pembebasan iuran sekolah dapat menyebabkan keterlepasan tanggungjawab dan ketergantungan orang tua terhadap pemerintah dalam pendidikan anak.

Steer (2005) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan, pendidikan dan infra struktur selalu berada dibawah rata-rata nasional, terutama karena layanan publik tidak menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan termiskin di Papua. Disaat yang sama, ada peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan didorong oleh Dana Otsus, namun prioritas pengeluaran pembangunan pemerintah daerah tidak banyak berubah. Sebagian besar dana APBD dialokasikan untuk pengeluaran rutin, dimana pengeluaran "lain-lain" mengalami peningkatan secara tidak proporsional.

Kemudian, Fatimah (2009) menemukan bahwa pemerintah daerah Payakumbuh pada Dinas Pendidikan alokasi terbesar belanja adalah untuk belanja non-Modal untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang belum mendukung peningkatan kinerja, sedangkan alokasi belanja Dinas Kesehatan alokasi terbesar juga pada belanja non-Modal yang dialokasikan untuk belanja langsung yang terkait dengan pelaksanaan program. Sehingga kinerja pelayanan kedua dinas ini cenderung mengalami penurunan. Dan kemampuan kedua dinas ini masih rendah dalam menyerap anggaran (*underspending*). Hal ini disebabkan karena terlambatnya pengesahan perubahan APBD. Keterlambatan pengesahan APBD yang mengakibatkan tidak terserapnya seluruh anggaran, ini juga mengakibatkan

banyak program yang direncanakan tidak terealisasi, karena waktu pelaksanaan yang tersisa sangat sempit.

Penelitian-penelitian diatas selanjutnya dapat disimpulkan dalam tabel 2.3 berikut ini :

No	Peneliti (tahun)	Judul	Hasil
1	Ir. Brahmantio Isdijoso,Ms dan Ir. Tri Wibowo,MM (2002)	Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)	DAU tahun 2001 merupakan penyangga utama pembiayaan APBD. Yang berdampak pada bergesernya alokasi anggaran pembangunan, tidak terkecuali anggaran sektor pendidikan untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin.
2	Nina Tayoniah dan Syaikhu Usman (2004)	Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah : Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pendidikan Dasar	Penetapan besarnya anggaran program pembinaan pendidikan dasar (SDN) sepenuhnya menjadi kewenangan pemda. Oleh karenanya, antara satu daerah dengan daerah lain terdapat bentuk program dan alokasi anggaran yang bervariasi
3	Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.ppl Teguh Kurniawan, S.Sos, M.Sc Drs. Azwar Hasan.MEPA (2005)	Efisiensi Anggaran Sebagai Faktor Kunci Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Program Inovasi di Kabupaten Jembrana	Kunci semua keberhasilan dalam pelaksanaan program- program inovasi di Kabupaten Jembrana adalah adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana khususnya Bupati untuk selalu meningkatkan perbaikan pelayanan masyarakat dan efisiensi penggunaan anggaran dalam semua sektor pembangunan

4	Andrew Steer (2005)	Analisis Pengeluaran Publik Papua Sebuah Tinjauan Umum : Keuangan Daerah Dan Pelayanan Publik Pada Wilayah Tertinggal Di Indonesia	Kondisi kesehatan, pendidikan dan infra struktur selalu berada dibawah rata-rata nasional, terutama karena layanan publik tidak menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan termiskin di Papua.
5	Fatimah (2009)	Analisis Kebijakan Belanja Dan Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kota Payakumbuh	Alokasi belanja terbesar dinas pendidikan dan kesehatan adalah untuk belanja non modal. Dan kinerja untuk kedua dinas tersebut cenderung mengalami penurunan

Tema dalam penelitian ini hampir sama dengan tema penelitian diatas yaitu mengenai kemampuan otonomi pemerintah daerah dalam bidang belanja dan pelayanan dasar pendidikan. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya adalah dalam objek penelitian, periode waktu penelitian, variabel dan pengukuran penelitian serta alat analisis yang digunakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kota Tanjungpinang di provinsi Kepulauan Riau. Adapun alasan peneliti memilih kota Tanjungpinang sebagai lokasi penelitian karena anggaran pendidikan kota Tanjungpinang walaupun belum mencapai 20% dari APBD diluar dari gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sesuai yang diamanatkan UU No. 20 tahun 2003 pasal 49 tetapi jumlahnya semakin tahun semakin meningkat dan jumlahnya besar, masing-masing yaitu tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 sebesar 19,26%, 24,28%, 25,99% dan 25,65% dari APBD. Dan dengan jumlah belanja pendidikan yang dianggarkan tersebut ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan dalam pencapaian standar pelayanan minimal.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini dimaksudkan untuk melihat gambaran besarnya kebutuhan belanja dalam pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pendidikan dasar sembilan tahun di kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini analisis gap akan dilakukan terhadap indikator SPM yang ada yaitu menganalisis gap (kesenjangan) antara pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun yang telah dilaksanakan dengan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi. Dan analisis kebutuhan belanja dilakukan hanya untuk indikator SPM yang belum tercapai.

3.3. Variabel Penelitian dan Pengukuran

a. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kota Tanjungpinang

Adapun untuk melihat ketercapaian SPM pendidikan dasar sembilan tahun dengan menggunakan indikator-indikator yang tertuang didalam Kepmendiknas RI No.129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional, tetapi untuk indikator persentase siswa yang memperoleh nilai memuaskan pada uji sampel yang dilakukan nasional tidak dilakukan pengukuran karena kota Tanjungpinang belum mengikuti uji sampel tersebut. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni didefinisikan sebagai perbandingan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dengan kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM menjadi indikasi kemudahan penduduk usia tertentu untuk menjangkau satuan pendidikan sekolah pada jenjang tertentu. Nilai APM juga dapat menunjukkan anak bersekolah tepat pada waktunya yaitu bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia mereka. Adapun indikator SPM untuk APM tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs adalah 95% dan 90%.

Banyaknya murid usia 7-12 tahun

$$\text{APM SD} = \frac{\text{Banyaknya murid usia 7-12 tahun}}{\text{Banyaknya penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100 \%$$

Banyaknya penduduk usia 7-12 tahun

Banyak murid usia 13-15 tahun

$$\text{APM SMP} = \frac{\text{Banyak murid usia 13-15 tahun}}{\text{Banyaknya penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100 \%$$

Banyaknya penduduk usia 13-15 tahun

2. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah dinyatakan dalam persentase, dimana APS tersebut menunjukkan jumlah siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang tertentu. Dan indikator SPM untuk APS baik untuk tingkat SD/MI maupun untuk tingkat SMP/MTs adalah tidak melebihi 1 % dari jumlah siswa yang bersekolah.

3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dan setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bergkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Berdasarkan indikator SPM untuk pemenuhan sarana dan prasarana baik untuk tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs adalah 90% sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.

4. Memiliki Tenaga Kependidikan Non Guru

Tenaga kependidikan non guru ini untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya yaitu kegiatan tata usaha dan bimbingan konseling (BK). Dan didalam indikator SPM untuk tenaga kependidikan non

guru untuk tingkat SD/MI tidak ditetapkan, tetapi untuk tingkat SMP/MTs indikator SPM menetapkan 80% sekolah harus memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya.

5. Jumlah Guru Yang Diperlukan Terpenuhi

Guru pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran sekurang-kurangnya mencakup guru mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan guru pada SMP/MTs terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Untuk indikator SPM jumlah guru yang diperlukan, baik untuk tingkat SD/MI maupun untuk tingkat SMP/MTs yaitu 90% dari jumlah guru yang diperlukan terpenuhi.

6. Kualifikasi Guru

Baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs didalam indikator SPM mengharuskan 90% guru SD/MI dan guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional. Adapun standar pendidik pada tingkat SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) begitu juga untuk tingkat SMP/MTs.

7. Siswa Memiliki Buku Pelajaran Yang Lengkap

Untuk tingkat SD/MI SPM mengharuskan 95% siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran. Dan untuk tingkat SMP/MTs SPM mengharuskan 100% siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk setiap mata pelajaran.

8. Jumlah Siswa Perkelas

Didalam SPM jumlah siswa perkelas baik untuk tingkat SD/MI ataupun tingkat SMP/MTs menyebutkan jumlah siswa perkelas antara 30-40 siswa.

9. Lulusan Melanjutkan Ke Jenjang Berikutnya

SPM untuk lulusan melanjutkan ke jenjang berikutnya dinyatakan didalam persentase. Untuk tingkat SD/MI 95% dari lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs. Dan 70% dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

b. Belanja Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kota Tanjungpinang.

Untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar sembilan tahun, maka akan dianalisis program pendidikan yang telah dilaksanakan, gap (kesenjangan) antara SPM dan ketercapaian, yang dilakukan dengan membandingkan kinerja pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan pemerintah kota Tanjungpinang yang tergambar dalam profil pendidikan, dengan target yang harus dipenuhi yang tertuang dalam SPM. Selanjutnya akan dianalisis program pendidikan yang telah dilaksanakan dengan melakukan mapping terhadap program yang seharusnya ada beserta kebutuhan belanjanya dalam rangka mencapai target SPM. Dan analisis kebutuhan belanja hanya dilakukan hanya untuk indikator SPM yang belum tercapai.

9.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data sekunder, berasal dari :

1. BPKAD/PPKD, berupa Ringkasan Perhitungan APBD Kota Tanjungpinang 3 tahun terakhir (2006 s/d 2009);
 2. Bappeda Kota Tanjungpinang, berupa Tanjungpinang Dalam angka untuk 3 tahun terakhir (2006 s/d 2009); Profil Daerah Kota Tanjungpinang 3 tahun terakhir (2006 s/d 2009); LKPJ Kota Tanjungpinang tahun 2009.
 3. Dinas pendidikan Kota Tanjungpinang, berupa buku profil pendidikan; Renstra dan RPJM Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
- b. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Field Research (penelitian lapangan)

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dengan mendatangi dinas-dinas terkait.

- b. Library research

Data teoritis yang berasal dari studi literatur yang berasal dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah diatas.

3.6. Metode Analisis

Untuk menganalisis kesesuaian kondisi kinerja pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan di kota Tanjungpinang dengan SPM, akan dilaksanakan analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis komparatif yaitu membandingkan antara kondisi kinerja pelayanan pendidikan dengan SPM pendidikan yang harus dipenuhi yaitu menggunakan 8 indikator untuk tingkat SD/MI dan 9 indikator

untuk tingkat SMP/MTs yang terdapat didalam indikator SPM. Sedangkan indikator persentase siswa yang memperoleh nilai memuaskan pada uji sampel yang dilakukan nasional tidak dianalisis karena kota Tanjungpinang belum mengikuti uji sampel tersebut.

- a. Analisis APM (Angka Partisipasi Murni) dihitung dengan cara membandingkan jumlah siswa yang terdaftar pada jenjang SD/MI atau SMP/MTs yang berumur 7-12 tahun untuk tingkat SD/MI dan berumur 13-15 tahun untuk tingkat SMP/MTs dengan jumlah penduduk yang berumur 7-12 untuk tingkat SD/MI atau 13-15 tahun untuk tingkat SMP/MTs. Atau dengan kata lain nilai APM dapat dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dengan kelompok usia sekolah.
- b. APS (Angka Putus Sekolah) dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah siswa yang putus sekolah dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tertentu.
- c. Analisis kebutuhan sekolah SD/MI dan SMP/MTs dihitung dengan menggunakan standar pelayanan minimal yang mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dimana untuk satu SD/MI dibutuhkan minimal 6 ruang kelas dengan jumlah murid 30 orang per kelas sehingga satu sekolah minimal dimanfaatkan oleh 180 orang siswa. Sedangkan untuk SMP/MTs minimal memiliki 9 ruang kelas dengan siswa 30 orang per kelas sehingga satu SMP/MTs ditempati oleh 270 orang siswa. Dan untuk analisis fasilitas pendukung sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan data profil pendidikan yaitu melihat berapa jumlah perpustakaan, lapangan olah raga, UKS dan Laboratorium dibandingkan

dengan jumlah sekolah yang ada. Dimana setiap sekolah harus memiliki fasilitas pendukung tersebut.

- d. Menganalisis berapa kebutuhan tenaga kependidikan non guru dapat dilakukan dengan cara membandingkan jumlah tenaga kependidikan non guru yang ada dengan jumlah sekolah. Dan setiap sekolah tingkat SMP/MTs harus memiliki minimal 1 orang tenaga kependidikan non guru. Sedangkan untuk SD/MTs tidak harus memiliki tenaga kependidikan non guru tersebut.
- e. Analisis kebutuhan guru SD/MI mengacu pada PP No.19 Tahun 2005 dimana satu SD memiliki 6 guru kelas, 1 orang guru olah raga, 1 orang guru agama dan 1 orang kepala sekolah sehingga satu SD/MI dibutuhkan 9 guru. Sedangkan untuk SMP/MTs mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005, yang dihitung berdasarkan jam pelajaran/ minggu dikali jumlah kelas dibagi dengan jam mengajar minimal seorang guru.
- f. Peningkatan kualifikasi guru menjadi S1 dianalisis dengan cara mengidentifikasi kualifikasi guru yang ada saat ini untuk mengetahui jumlah guru yang perlu ditingkatkan pendidikannya, dengan asumsi bahwa dari pendidikan SLTA ke S1 perlu waktu 10 semester, D1 ke S1 perlu waktu 8 semester, dari D2 ke S1 diperlukan waktu 6 semester, dari D3 ke S1 diperlukan waktu 4 semester.
- g. Analisis kebutuhan buku pelajaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah buku yang ada dengan jumlah siswa, dimana setiap siswa harus memiliki buku pelajaran yang lengkap untuk semua mata pelajaran.

- h. Jumlah siswa perkelas baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs berjumlah antara 30-40 siswa.
- i. Analisis lulusan melanjutkan ke jenjang berikutnya dilakukan dengan cara membandingkan jumlah siswa yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dengan siswa yang lulus pada tingkat sebelumnya.

Sedangkan kebutuhan belanja hanya akan dihitung untuk kebutuhan pada tahun 2009, dengan alasan karena alokasi anggaran yang terbesar diantara tahun 2006-2009 terjadi pada tahun 2009. Dan kebutuhan belanja yang akan dihitung hanya untuk indikator pencapaian APM, kualifikasi guru dan pemenuhan kebutuhan buku pelajaran sebagai berikut:

- a. Kebutuhan belanja untuk memenuhi APM menggunakan biaya siswa per tahun yang merupakan hasil studi Triaswati (2006) yang berjudul *Financing Gap for Poverty Alleviation Programs in Indonesia: Measurement and Implementation* yang tercantum didalam Naskah Akademik "Standar Biaya Pendidikan" yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, yaitu sebesar Rp 4.493.700,-/siswa/tahun untuk SD/MI dan Rp 5.801.4000,-/siswa/tahun untuk SMP/MTs.
- b. Kebutuhan belanja untuk meningkatkan kualifikasi guru menggunakan standar yang dikeluarkan pemerintah daerah dimana untuk SLTA ke S1 dibutuhkan dana sebesar Rp 17.500.000/orang, D1 ke S1 Rp 14.000.000/orang, D2 ke S1, Rp 10.500.000/orang, D3 ke S1, Rp 7.000.000/orang.

- c. Kebutuhan belanja untuk pengadaan buku pelajaran sains dan bahasa menggunakan standar harga yang ditetapkan pada BOS BUKU, yaitu Rp 20.000.-per buku, dan dikali dengan jumlah siswa.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang berada di Teluk Bintang yang letaknya berhadapan langsung dengan Pulau Penyengat sebagai pusat kerajaan Melayu Riau – Lingga yang berdiri sekitar Abad XVI.

Kehidupan masyarakat Tanjungpinang memiliki ciri khas masyarakat Melayu Kepulauan dengan beragam penduduk yang cukup heterogen. Hal ini bukanlah merupakan suatu keanehan jika dilihat dari letak geografis Kota Tanjungpinang yang cukup strategis, sehingga menjadikan kota ini sebagai tempat pertemuan pedagang dari berbagai daerah dan bangsa dengan para pribumi, sehingga dalam kurun waktu yang relatif sangat cepat menjadikan Tanjungpinang sebagai pusat perdagangan dengan berbagai aktivitas perekonomian. Perkembangan Kota Tanjungpinang ditandai dengan perubahan status pemerintahan dan merupakan perjalanan historis yang panjang.

Awalnya Tanjungpinang merupakan pusat pemerintahan kecamatan Bintan Selatan dengan wilayah meliputi kecamatan Galang (saat ini menjadi wilayah kota Batam). Laju pertumbuhan diberbagai sektor kehidupan masyarakat serta gerak pembangunan yang sangat pesat, didukung letak geografisnya yang berdekatan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia menjadikan kota Tanjungpinang jauh melebihi layaknya sebuah kota kecamatan. Perkembangan yang dirasakan begitu pesat inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan) untuk berupaya meningkatkan status kota Tanjungpinang dari

ibukota kecamatan menjadi sebuah kota administratif yang membawahi beberapa kecamatan.

Pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 Tanggal 18 Oktober 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjungpinang, maka berubahlah status kota Tanjungpinang pada waktu itu sebagai kota kecamatan menjadi kota Administratif yang membawahi kecamatan Tanjungpinang Timur dan Tanjungpinang Barat.

Pada tahun 2001 sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, maka kotif Tanjungpinang berubah status menjadi kota Tanjungpinang sebagai kota otonom yang menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan sama dengan Kabupaten/kota lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, kemudian disusul dengan pengangkatan Hj. Suryatati A. Manan sebagai Pejabat Walikota Tanjungpinang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-325 tanggal 24 Agustus 2001.

Pada tahun 2007 pemilihan walikota Tanjungpinang yang kedua kali, Suryatati A. Manan kembali terpilih untuk memimpin kota Tanjungpinang sampai sekarang. Sebagai pusat pemerintahan berada di bagian utara yaitu di Senggarang, hal ini adalah sebagai penyeimbang kesenjangan pembangunan dan kepadatan penduduk yang selama ini berpusat di kota lama (bagian sebelah selatan).

Moto kota Tanjungpinang adalah “Jujur Bertutur Bijak Bertindak” yang tertulis pada pita berwarna coklat mengandung makna amanah dan bijaksana dalam menyelenggarakan pemerintah dan sebagai pelayan masyarakat dapat memberikan kekekalan dan keabadian yang nyata bagi masyarakat kota Tanjungpinang, serta slogan kota Tanjungpinang adalah “Gurindam” yang

merupakan seingkatan dari gigh, unggul, rapi, indah, nyaman, damai, aman dan manusiawi yang mengandung makna kota Tanjungpinang ditata secara terpadu untuk menciptakan lingkungan yang indah, hijau, berbunga, bersih, memiliki daya pengikat bagi wisatawan yang merupakan cermin dari pemerintahan yang wibawa, bebas dari penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan bertindak berlandaskan adat istiadat, budaya, moralitas dan kemanusiaan.

4.1.1 Kondisi Geografis dan Pemerintah

Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah mencapai 812,70 Km² terdiri atas daratan seluas 239,50 Km² dan lautan seluas 573,20 Km². Letak geografis kota Tanjungpinang berada pada 0⁰52' sampai dengan 0⁰59' Lintang Utara dan 104⁰23' sampai dengan 104⁰34' Bujur Timur.

Batas-batas wilayah kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kecamatan teluk Bintan Kabupaten Bintan. |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. |
| Sebelah Barat | : Selat Karas Kecamatan Galang Kota Batam. |
| Sebelah Timur | : - Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
- Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. |

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah yang terdapat di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang, terdiri dari :

- Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 ditetapkan sekretariat daerah, staf ahli, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.

Sekretariat daerah terdiri dari 9 bagian: bagian administrasi pemerintah umum, bagian administrasi perekonomian, bagian administrasi pembangunan, Bagian hukum dan hak azazi manusia, bagian organisasi dan tatalaksana, bagian umum dan bagian administrasi keuangan.

Staf ahli terdiri dari 5 (lima) yaitu : staf ahli bidang hukum dan politik, staf ahli bidang pemerintahan, staf ahli bidang pembangunan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, staf ahli ekonomi dan keuangan.

Sekretariat DPRD terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu : Bagian Persidangan dan Risalah, Bagian umum, Bagian keuangan, dan Bagian lumas dan protokol.

- Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 ditetapkan 11 dinas yaitu : (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2) Dinas Kesehatan (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (6) Dinas Keperudukan dan Pencatatan Sipil (7) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (8) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (10) Dinas Pekerjaan Umum dan (11) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar.
- Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 ditetapkan 9 lembaga teknis daerah, yaitu ; (1) Inspektorat Daerah (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman modal (3) Badan Lingkungan Hidup (4) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (5) Badan Kepegawaian Daerah (6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (7) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (8) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan (9) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

- Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.
- Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 ditetapkan Kota Tanjungpinang terbagi atas 4 (empat) kecamatan dan 18 Kelurahan yaitu :
 - a. Kecamatan Tanjungpinang Kota terbagi atas : Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Senggarang, Kelurahan Penyengat dan Kelurahan Kampung Bugis.
 - b. Kecamatan Tanjungpinang Barat terbagi atas : Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kemboja dan Kelurahan Bukit Cermin.
 - c. Kecamatan Tanjungpinang Timur terbagi atas : Kelurahan Batu Sembilan, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan kampung Bulang dan Kelurahan Air Raja.
 - d. Kecamatan Bukit Bestari terdiri atas : Kelurahan Dompok, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Sungai Jang, Kelurahan Tanjung Unggat dan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.

Tabel 4.1 Administrasi Pemerintahan Kota Tanjungpinang

No	Variabel	Jumlah	No	Variabel	Jumlah
1	Kabupaten/ Kota	1	5	Luas wilayah Seluruhnya	812,70 Km ²
2	Kecamatan	4			
3	Kelurahan	18		- Daratan	239,50 Km ²
4	Desa Tertinggal	-		- Lautan	573,20 Km ²

Sumber : Pemko Tanjungpinang

4.1.2 Kondisi Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang.

Tingkat pendapatan suatu daerah dapat diukur lain dari pendapatan per kapita, penerimaan PBB, PAD serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan masyarakat. PAD Kota Tanjungpinang tahun 2009 sebesar Rp 28.004.988.357 sementara penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 7.143.394.640. Mata pencaharian penduduk ada disektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebanyak 7.053 orang (4,14%), disektor pertambangan dan penggalian sebanyak 1.763 orang (1,03%), disektor industri pengolahan sebanyak 13.404 orang (7,87%), disektor listrik, gas dan air sebanyak 1.626 orang (0,95%), disektor bangunan/konstruksi sebanyak 11.655 orang (6,84%), disektor perdagangan 39.964 orang (23,45%), disektor transportasi dan komunikasi sebanyak 18.556 orang (10,85%), disektor keuangan, asuransi dan persewaan gedung 2.301 (2,34%) dan disektor jasa lainnya 1.350 orang (0,79%).

Tabel dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan keadaan ekonomi kota Tanjungpinang untuk tahun 2009.

Tabel 4.2 Keadaan Ekonomi Kota Tanjungpinang Tahun 2009

No	Komponen	Jumlah	No	Komponen	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28.004.988.357	2	Pendapatan per kapita	11.369.986
3	PBB	7.143.394.640	4	UMR	895.000
5	Mata pencaharian Menurut sektor :				
	a. Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Laut	7.053 orang		e. Bangunan/ Konstruksi	11.655 orang
	b. Pertambangan/ Penggalian	1.763 orang		f. Perdagangan	39.964 orang
	c. Industri Pengolahan	13.404 orang		g. Transportasi dan Komunikasi	18.556 orang
	d. Listrik, gas dan air	1.626 orang		h. Keuangan, Asuransi, Sewa	2.301 orang
				i. Jasa Lainnya	1.350 orang

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

4.1.3 Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Tanjungpinang

Pendidikan merupakan kaharusan dimasa sekarang, dengan pendidikan yang baik akan dihasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan yang saat ini tengah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendidikan yang baik akan dapat diselesaikan masalah-masalah yang muncul sebagai efek negatif dari pembangunan seperti kemiskinan, ketimpangan dan masalah pembangunan lainnya.

Harus diakui bahwa keterlambatan dalam merespon pentingnya pembangunan sumberdaya manusia di negara Indonesia membawa dampak pada lambatnya pembangunan di bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari indikator pembangunan di bidang pendidikan yang hasilnya masih jauh memuaskan. Indikator pendidikan mencakup masukan, proses dan keluaran. Indikator masukan

anatar lain rasio sekolah - siswa, rasio guru - siswa, rasio buku - siswa. Indikator proses pendidikan mencakup sistem pendidikan dan undang-undang, serta indikator keluaran berupa angka putus sekolah, persentase siswa melanjutkan, nilai, dan partisipasi sekolah. Disamping itu juga ada indikator lain yang juga sering digunakan yaitu angka melek huruf. Dalam uraian lebih lanjut, pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan formal dimana hal-hal yang bersifat indikatif dapat dimanfaatkan untuk memberikan daya guna yang lebih baik dalam berbagai kepentingan.

Kemajuan pendidikan di kota Tanjungpinang cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini baik berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Walikota bagi siswa baru kurang mampu (PSB) dan pembebasan biaya sekolah bagi siswa SMP/MTs serta bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/MA/SMK, Block Grant, rehabilitasi kelas belajar (RKB) dan lain sebagainya telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah pinggiran, daerah dengan penduduk miskin dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. Pembangunan pendidikan di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari profil pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas pendidikan dan Olah Raga Kota Tanjungpinang.

4.1.3.1 Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar

Pendidikan tingkat sekolah dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) Negeri, SD Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta. Jumlah sekolah pada

pendidikan tingkat sekolah dasar pada tahun 2009 sebanyak 64 sekolah, hal ini berarti terdapat pengurangan sebanyak 2 sekolah dari tahun 2006. Pengurangan tersebut berasal dari SD Negeri yaitu ada SD yang digabungkan menjadi satu. Tabel dibawah ini menunjukkan pelayanan yang dilaksanakan di Kota Tanjungpinang selama periode 2006 s/d 2009.

Tabel 4.3 Jumlah Sekolah, Siswa, Guru, Ruang Kelas dan Kelas/ Rombel (Rombongan Belajar) SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009

No	Tahun	Sekolah	Siswa	Guru	Ruang Kelas	Kelas (Rombel)
1	2006	66	19.693	1.004	481	652
2	2007	63	20.422	944	481	642
3	2008	64	21.049	1.158	501	674
3	2009	64	21.449	1.517	513	705
4	Rata-rata 2006 - 2009	64	20.653	1.156	494	668

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009

Tabel 4.4 Rasio Sekolah Terhadap Siswa, Guru, Ruang Kelas dan Kelas/ Rombel (Rombongan belajar) SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009

No	Tahun	Sekolah - Siswa	Sekolah-Guru	Sekolah-Ruang Kelas	Sekolah-Rombel
1	2006	298	15	7	10
2	2007	324	15	8	10
3	2008	329	18	8	11
3	2009	335	24	8	11
4	Rata-rata 2006 - 2009	323	18	8	11

Sumber: Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009

Dalam periode 2006 s/d 2009 memperlihatkan kecenderungan yang sama, baik dari rata-rata jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah ruang kelas dan jumlah kelas untuk sekolah yang ada. Hanya yang sedikit berbeda yaitu pada tahun 2009 untuk jumlah guru, yang mengalami peningkatan. Dari rata-rata jumlah ruang kelas dan jumlah kelas/ rombongan belajar (rombel) yang ada dalam satu sekolah dapat dilihat bahwa terdapat ruang kelas yang tidak cukup bagi para siswa untuk belajar sehingga terdapat shift untuk kelas/ rombongan belajar (rombel) yaitu ada

yang masuk pagi dan masuk siang. Tetapi walaupun demikian tidak mengganggu dalam proses belajar mengajar. Mungkin yang perlu di perhatikan adalah kondisi ruang kelas yang layak untuk ditempati atau digunakan dalam proses belajar mengajar. Begitu juga jika dilihat jumlah rata-rata guru untuk satu sekolah memperlihatkan bahwa ketersediaan guru cukup melayani siswa yang ada, namun yang perlu diperhatikan adalah sebaran guru yang mengajar, baik dari segi tingkat pendidikan maupun ketepatan dalam menempatkan seorang guru pada sekolah serta kesesuaian ilmu yang dimiliki dengan bidang studi yang di ajar.

Indikator yang menunjukkan kepadatan kelas pada suatu jenjang pendidikan adalah rasio kelas terhadap siswa yaitu menunjukkan banyaknya siswa yang mengikuti pendidikan untuk setiap kelas.

Dalam periode 2006 – 2009 rasio sekolah terhadap jumlah siswa, guru dan ruang kelas menunjukkan bahwa pada umumnya setiap unit sekolah memiliki siswa kurang lebih 323 siswa dengan 18 orang guru dan 8 ruang kelas serta 11 kelas/ rombongan belajar (rombel). Dengan rasio seperti tersebut diatas berarti secara keseluruhan, pendidikan tingkat sekolah dasar tidak menghadapi masalah yang serius dalam hal daya tampung siswa, dan ruang kelas. Rasio sekolah terhadap jumlah siswa, guru dan ruang kelas pada setiap tahunnya relatif sama dengan rasio rata-rata 2006 -2009. Masalah yang masih dihadapi adalah kelayakan seorang guru dan kesesuaian ilmu yang dimiliki dengan bidang studi yang diajar.

Pada pendidikan tingkat sekolah dasar, secara umum seorang guru menghadapi atau mengajar dalam satu kelas dengan tidak mempersoalkan jumlah murid yang diajar. Kondisi ideal jumlah siswa dalam satu kelas maksimal adalah 40 orang siswa.

Tabel 4.5 Rasio Kelas/ Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Siswa SD/MI di Kota Tanjungpinang Tahun 2006 - 2009

No	Tahun	Jumlah		Rasio
		Kelas	Siswa	
1	2006	652	19.693	1 : 31
2	2007	642	20.422	1 : 31
3	2008	674	21.049	1 : 31
4	2009	705	21.449	1 : 31
5	Rata - rata	668	20.653	1 : 31

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006 – 2009

Rasio kelas terhadap siswa di Kota Tanjungpinang dalam tahun 2006 sampai dengan 2009 menunjukkan kepadatan siswa dalam setiap kelasnya sebanyak 31 orang. Hal ini menunjukkan seorang guru mengajar dalam kelas dengan jumlah siswa 31 orang. Jumlah tersebut berada dibawah kepadatan maksimal yaitu 40 siswa per kelas. Terdapat kepadatan dalam kelas yang relatif masih rendah menunjukkan sekolah masih mampu menampung tambahan siswa.

Tabel 4.6 Rasio Guru Terhadap Siswa SD/MI di Kota Tanjungpinang Tahun 2006 - 2009

No	Tahun	Jumlah		Rasio
		Guru	Siswa	
1	2006	1.004	19.693	1 : 20
2	2007	944	20.422	1 : 22
3	2008	1.158	21.049	1 : 18
4	2009	1.517	21.449	1 : 14
5	Rata - rata	1.156	20.653	1 : 18

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006 – 2009

Rasio guru terhadap siswa dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan 1 : 18. Angka tersebut berada dibawah angka rasio kelas – siswa yaitu angka 1 : 31. Hal ini menunjukkan bahwa ada guru yang tidak menjadi guru kelas. Dikarenakan, guru pada tingkat SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran tertentu yaitu guru mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan

kesehatan diajarkan oleh guru tersendiri untuk satu sekolah. Sehingga dalam satu sekolah minimal terdapat 6 orang guru kelas dan 1 orang guru agama dan 1 orang guru olah raga.

Secara lebih rinci sebaran pelayanan pendidikan tingkat pendidikan dasar pada 4 kecamatan di Kota Tanjungpinang pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7 Jumlah Sekolah, Siswa, Kelas/ Rombongan Belajar (Rombel) dan Guru SD/MI di Kota Tanjungpinang Tahun 2009

No	Kecamatan	Sekolah	Siswa	Kelas (Rombel)	Guru
1	Tanjungpinang Kota	12	2.827	108	228
2	Tanjungpinang Barat	17	5.220	166	365
3	Tanjungpinang Timur	15	6.781	208	450
4	Bukit Bestari	20	6.621	223	474
5	Jumlah	64	21.449	705	1.517

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009

Untuk tingkat SD/MI jumlah sekolah yang terbanyak terdapat di kecamatan Bukit Bestari dengan jumlah 20 sekolah, sedangkan siswa terbanyak terdapat pada kecamatan Tanjungpinang Timur dan guru terbanyak terdapat pada kecamatan Bukit Bestari. Data data diatas dapat dilihat bahwa sebaran jumlah sekolah, murid dan guru terdistribusi cukup merata.

Dengan banyaknya jumlah sekolah dan kelas (rombel) akan membutuhkan guru yang lebih banyak, hal ini akan mengakibatkan kecamatan yang memiliki jumlah sekolah yang sedikit tetapi jumlah siswa lebih banyak seperti Tanjungpinang Timur akan memiliki rasio guru – siswa lebih besar. Untuk rasio sekolah-siswa, sekolah-kelas (rombel), sekolah-guru, kelas (rombel)-siswa dan guru – siswa untuk masing-masing kecamatan yang ada dikota Tanjungpinang diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8 Rasio Sekolah, Siswa, Guru, Kelas (Rombel) Tingkat SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2009

No	Kecamatan	Sekolah - Siswa	Sekolah - Kelas	Sekolah - Guru	Kelas - Siswa	Guru - Siswa
1	Tanjungpinang Kota	236	9	19	27	12
2	Tanjungpinang Barat	308	10	21	32	15
3	Tanjungpinang Timur	453	14	30	33	15
4	Bukit Bestari	332	11	24	30	14
5	Rata - Rata	335	11	24	31	14

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009

Rata-rata rasio sekolah-siswa tingkat SD/MI di Kota Tanjungpinang untuk tahun 2009 adalah 335 orang, apabila dibandingkan dengan rasio rata-rata, kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat dan Bukit Bestari menunjukkan angka dibawah rasio rata-rata. Tetapi kecamatan Tanjungpinang Kota menunjukkan rasio yang paling rendah, sehingga satu kelas hanya diisi 27 orang siswa yaitu dibawah standar jumlah siswa perkelas yaitu 30-40 siswa perkelas. Sedangkan Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki jumlah siswa terpadat, dimana untuk satu kelas diisi oleh 33 orang siswa. Tetapi walaupun demikian jumlah tersebut belum melampaui dari jumlah maksimal jumlah siswa perkelas.

Apabila dilihat secara keseluruhan Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki rasio yang tertinggi baik dari rasio sekolah-siswa, sekolah-kelas, sekolah guru, kelas-siswa dan guru-siswa. Hal ini disebabkan karena pada Kecamatan Tanjungpinang Timur walaupun memiliki jumlah siswa yang terbanyak tetapi diimbangi dengan jumlah guru dan jumlah kelas. Dengan demikian pendidikan tingkat SD/MI pada Kecamatan Tanjungpinang Timur tidak mengalami suatu hambatan dalam proses belajar apabila dipandang dari sisi ketersediaan sekolah, guru dan kelas apabila dibanding dengan jumlah siswa yang ada. Hal yang menyebabkan jumlah siswa tingkat SD/MI banyak terdapat di Kecamatan

Tanjungpinang Timur karena luas wilayah Kecamatan Tanjungpinang yang terluas apabila dibandingkan dengan ketiga kecamatan yang lainnya dan pengembangan untuk kota Tanjungpinang lebih diarahkan pada Kecamatan Tanjungpinang Timur tersebut.

4.1.3.2 Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama

Pendidikan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) meliputi SMP Negeri, SMP Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta. Jumlah sekolah pada pendidikan tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 2009 sebanyak 25 sekolah, ini berarti terdapat penambahan sebanyak 4 sekolah dari tahun 2006. Tabel dibawah ini menunjukkan pelayanan yang dilaksanakan di Kota Tanjungpinang selama periode 2006 s/d 2009

Tabel 4.9 Jumlah Sekolah, Siswa, Guru dan Keias/ Rombongan Belajar (Rombel), SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2006 - 2009

No	Tahun	Sekolah	Siswa	Guru	Ruang Kelas	Kelas (Rombel)
1	2006	21	8.409	492	243	222
2	2007	22	8.652	515	243	233
3	2008	25	9.075	568	270	242
4	2009	25	9.257	668	274	260
5	Rata-rata 2006 - 2009	24	8.849	561	256	240

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006 s/d 2009

Tabel 4.10 Rasio Sekolah Terhadap Siswa, Guru, Ruang Kelas dan Kelas/ Rombel SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009

No	Tahun	Sekolah - Siswa	Sekolah- Guru	Sekolah- Ruang Kelas	Sekolah- Rombel
1	2006	401	24	12	11
2	2007	394	24	11	11
3	2008	363	23	11	10
3	2009	370	27	11	11
4	Rata-rata 2006 - 2009	369	24	11	10

Sumber: Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009

Dalam periode 2006 s/d 2009 rasio sekolah terhadap jumlah siswa, guru dan ruang kelas menunjukkan bahwa umumnya setiap unit sekolah memiliki siswa kurang lebih 369 siswa dengan 24 orang guru, 11 ruang kelas dan 10 kelas (rombel). Rasio sekolah-siswa dari tahun 2006 – 2009 menunjukkan perbandingan 1 : 369 yang artinya setiap satu sekolah mempunyai 369 siswa. Pada tahun 2006, 2007 dan 2009 menunjukkan perbandingan diatas rata-rata yaitu 401, 393 dan 371. Dan pada tahun 2008 rasio sekolah – siswa berada dibawah rata-rata yaitu sebanyak 363. Berarti dari periode 2006 – 2009 jumlah siswa SMP cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya untuk masing- masing sekolah. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan sekolah pada tahun 2008, sehingga jumlah siswa pada satu sekolah semakin berkurang karena jumlah sekolah bertambah.

Rasio kelas terhadap siswa pendidikan tingkat SMP di Kota Tanjungpinang dalam tahun 2006 sampai dengan 2009 menunjukkan kepadatan siswa dalam setiap kelasnya sebanyak 37 siswa. Hal ini menunjukkan seorang guru mengajar dalam kelas dengan jumlah siswa 37 orang. Jumlah tersebut masih di bawah kepadatan maksimal yaitu 40 siswa per kelas.

Tabel 4.11 Rasio kelas terhadap siswa SMP/MTs di Kota Tanjungpinang Tahun 2006 s/d 2009

No	Tahun	Jumlah		Rasio
		Kelas	Siswa	
1	2006	222	8.409	1 : 38
2	2007	233	8.652	1 : 38
3	2008	242	9.075	1 : 38
4	2009	260	9.257	1 : 36
5	Rata - rata	240	8.849	1 : 37

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006 – 2009

Rasio guru terhadap siswa dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan 1 : 16. Angka tersebut berada dibawah angka rasio kelas – siswa yaitu angka 1 : 37. Hal ini menunjukkan bahwa ada guru yang tidak menjadi guru kelas. Dikarenakan, guru pada tingkat SMP/MTs terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Dan dari angka rasio dibawah menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengawasan guru terhadap siswa sehingga dapat meningkatkan mutu pengajaran. Karena semakin tinggi rasio guru terhadap siswa berarti semakin kurang tingkat pengawasan guru terhadap siswa sehingga dapat menurunkan mutu pengajaran.

Tabel 4.12 Rasio Guru Terhadap Siswa SMP/MTs di Kota Tanjungpinang Tahun 2006 - 2009

No	Tahun	Jumlah		Rasio
		Guru	Siswa	
1	2006	492	8.409	1 : 18
2	2007	515	8.652	1 : 17
3	2008	568	9.075	1 : 16
4	2009	668	9.257	1 : 14
5	Rata - rata	561	8.849	1 : 16

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006 – 2009

Secara lebih rinci sebaran pelayanan pendidikan tingkat pendidikan SMP/MTs pada 4 kecamatan di Kota Tanjungpinang pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13 Jumlah sekolah, Siswa, Kelas dan Guru SMP/MTs di Kota Tanjungpinang Tahun 2009.

No	Kecamatan	Sekolah	Siswa	Kelas (Rombel)	Guru
1	Tanjungpinang Kota	5	955	32	87
2	Tanjungpinang Barat	5	2.050	55	145
3	Tanjungpinang Timur	6	2.602	69	169
4	Bukit Bestari	9	3.650	104	267
5	Jumlah	25	9.257	260	668

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009

Untuk tingkat SMP/MTs jumlah siswa yang terbanyak terdapat di kecamatan Bukit Bestari dengan jumlah 3.650 siswa, hal tersebut disebabkan pada Kecamatan Bukit Bestari terdapat jumlah sekolah yang terbanyak. Sedangkan jumlah siswa dan sekolah yang terendah terdapat pada Kecamatan Tanjungpinang Kota. Hal ini disebabkan, Kecamatan Tanjungpinang Kota tersebut terdiri dari Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Senggarang, Kelurahan Penyengat dan Kelurahan Kampung Bugis, dimana Kelurahan Senggarang, Kelurahan Penyengat dan Kelurahan Kampung Bugis merupakan kelurahan yang berada pada pulau tersendiri, sehingga jumlah penduduk pada ketiga kelurahan tersebut dan pada Kecamatan Tanjungpinang Kota jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Apabila dilihat dari jumlah sekolah, siswa, kelas dan guru dari keempat kecamatan tersebut dapat dilihat bahwa rasio-rasionya sangat seimbang yang artinya bahwa dari jumlah sekolah dan jumlah siswa dapat diimbangi dari jumlah kelas dan jumlah guru yang ada. Untuk rasio guru – siswa diperlihatkan pada dibawah ini.

Tabel 4.14 Rasio Sekolah, Siswa, Guru, Kelas (Rombel) Tingkat SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009.

No	Kecamatan	Sekolah - siswa	Sekolah - kelas	Sekolah - guru	Kelas -siswa	Guru-siswa
1	Tanjungpinang Kota	191	6	18	30	11
2	Tanjungpinang Barat	410	11	29	38	14
3	Tanjungpinang Timur	434	12	29	38	16
4	Bukit Bestari	406	16	30	36	14
5	Rata – Rata	370	11	27	36	14

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009

Rata-rata rasio sekolah-siswa tingkat SMP/MTs di Kota Tanjungpinang untuk tahun 2009 adalah 370 orang, apabila dibandingkan dengan rasio rata-rata, hanya kecamatan Tanjungpinang Kota yang menunjukkan angka dibawah rasio

rata-rata, hal ini disebabkan jumlah sekolah pada kecamatan tersebut sedikit. Begitu juga apabila kita lihat dari rasio jumlah siswa pada suatu kelas yaitu satu kelas hanya diisi 30 siswa. Sedangkan Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki jumlah siswa terpadat, dimana untuk satu kelas diisi oleh 38 orang siswa. Tetapi walaupun demikian jumlah tersebut belum melampaui dari jumlah maksimal jumlah siswa perkelas yaitu 40 orang siswa.

4.2 Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini akan dibahas tentang kinerja pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun yang telah dilaksanakan di Kota Tanjungpinang selama periode 2006 – 2009, kemudian menganalisis besarnya gap (kesenjangan) antara pelayanan yang telah dilaksanakan tersebut dengan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk masing- masing indikator. Lalu menganalisis program-program bidang pendidikan yang telah dilaksanakan dari tahun 2006-2009. Selanjutnya menganalisis tingkat kebutuhan belanja dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar sembilan tahun di Kota Tanjungpinang.

4.2.1 Kinerja Pelayanan Pendidikan Dasar di Kota Tanjungpinang Tahun 2006 – 2009

Tabel dibawah ini menunjukkan kinerja pelayanan pendidikan dasar di kota Tanjungpinang mulai tahun 2006 – 2009 dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah untuk masing-masing tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Adapun APK SD/MI merupakan angka perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/MI

dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 12 tahun. APK SMP/MTs adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah siswa pada tingkat SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13 hingga 15 tahun.

APM SD/MI adalah angka perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 12 tahun. APM SMP/MTs adalah angka perbandingan penduduk usia antara 13 hingga 15 tahun yang terdaftar pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13 hingga 15 tahun.

Sedangkan angka partisipasi sekolah (dasar) adalah jumlah siswa kelompok usia pendidikan dasar (7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun) yang menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Untuk APK SD/MI dari tahun 2006 – 2009 menunjukkan angka lebih dari dari 100% hal ini artinya ada siswa yang bersekolah pada pendidikan SD/MI diluar dari umur 7 hingga 12 tahun yaitu siswa yang terdaftar pada SD/MI yang umurnya dibawah 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APK SD/MI ini dari tahun 2006 - 2008 terus mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pemerintah telah mulai membatasi umur anak yang akan masuk sekolah SD/MI yaitu minimal 6 tahun. Untuk APK tingkat SMP/MTs mengalami fluktuasi yaitu penurunan 10,88% ditahun 2007 kemudian peningkatan 9,7% tahun 2008 dan turun kembali 17,65% ditahun 2009. Untuk tahun 2009 APK yang menunjukkan angka di bawah 100% yaitu 93,36% artinya tidak semua anak yang berusia 13 hingga 15 tahun sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs karena ada anak yang berusia ini yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bahkan ada anak pada usia ini yang tidak melanjutkan pendidikan.

Baik APM tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs angka APM menunjukkan angka dibawah 100%, hal ini berarti belum semua anak usia sekolah baik 7 hingga 12 tahun untuk SD/MI maupun 13 hingga 15 tahun untuk SMP/MTs bersekolah atau mengenyam pendidikan pada usia SD/MI dan SMP/MTs. Dan untuk itu perlu diupayakan peningkatan pemerataan pendidikan.

Apabila dipandang dari angka partisipasi sekolah dari tahun 2006 – 2008 cenderung mengalami peningkatan baik untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs ini artinya semakin tahun jumlah siswa kelompok usia pendidikan dasar (7 – 12 tahun dan 13 -15 tahun) yang menempuh pendidikan dari per 1.000 jumlah penduduk Kota Tanjungpinang usia pendidikan dasar terus mengalami peningkatan. Berarti pemerintah Kota Tanjungpinang telah berupaya dalam peningkatan pemerataan pendidikan dasar bagi penduduknya walaupun pada tahun 2009 mengalami penurunan baik ditingkat SD/MI maupun di tingkat SMP/MTs. Hal ini disebabkan banyak anak yang telah mencapai usia 7 tahun untuk tingkat SD/MI belum masuk sekolah, begitu juga anak yang telah menamatkan SD/MI tidak melanjutkan pendidikan berikutnya yaitu tingkat SMP/MTs.

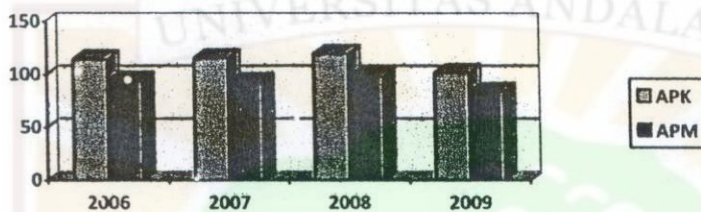
Tabel 4.15 Kinerja Pendidikan Dasar Indikator APK, APM dan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009

NO	Tahun	Indikator					
		APK		APM		Angka Partisipasi Sekolah	
		SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs
1	2006	114,49	112,19	94,70	80,35	947	804
2	2007	115,78	101,31	93,42	72,80	934	728
3	2008	119,68	111,01	98,11	77,68	981	777
4	2009	101,72	93,36	84,21	60,91	842	609

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006 -2009

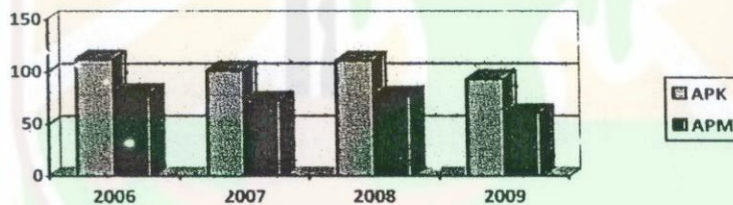
Dan dari tabel diatas dapat dibuat trend kinerja pendidikan Kota Tanjungpinang untuk indikator APK, APM dan Angka Partisipasi Sekolah baik tingkat SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2006 – 2009 seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.1 Trend APK dan APM Tingkat SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2006 - 2009



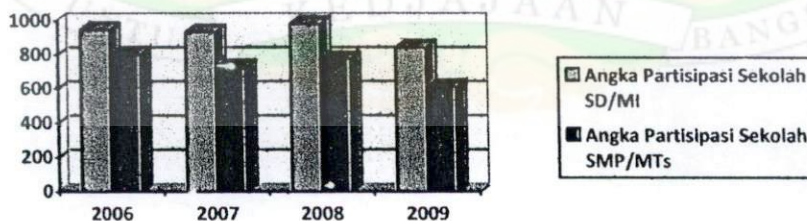
Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006 – 2009 Diolah

Gambar 4.2 Trend APK dan APM Tingkat SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2006 – 2009



Sumber: Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006 – 2009 Diolah

Gambar 4.3 Trend Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2006 - 2009



Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006 -2009 Diolah

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja pendidikan dari tahun 2006-2009 baik tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs untuk masing- masing indikator APK, APM dan Angka Partisipasi Sekolah, pada tahun 2009 menunjukkan angka

yang terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berarti kinerja pendidikan dasar Kota Tanjungpinang mengalami penurunan, padahal kalau dibandingkan dari anggaran pendidikan yang tersedia pada tahun 2009 justru mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan banyaknya program dibidang pendidikan yang tidak tepat sasaran dan anggaran pendidikan lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai yaitu untuk gaji pegawai dan guru. Bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009 untuk program wajib belajar pendidikan sembilan tahun ternyata kegiatan penyediaan dana pembebasan biaya pendidikan dasar sembilan tahun tidak ada, padahal tahun-tahun sebelumnya selalu ada.

Berikut ini adalah tabel kinerja pendidikan dasar sembilan tahun untuk indikator APK, APM dan Angka Partisipasi Sekolah untuk masing-masing kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang tahun 2009, sehingga kita akan dapat mengetahui gap (kesenjangan) per kecamatan untuk masing-masing kinerja pendidikan baik untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs.

Tabel 4.16 Kinerja Pendidikan Dasar Indikator APK, APM dan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tanjungpinang Tahun 2009.

NO	Kecamatan	Indikator					
		APK		APM		Angka Partisipasi Sekolah	
		SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs
1	Tanjungpinang Kota	63,59	48,60	52,86	23,32	529	233
2	Tanjungpinang Barat	94,19	75,12	78,89	53,50	789	535
3	Tanjungpinang Timur	135,38	107,74	110,77	68,16	1108	682
4	Bukit Bestari	108,74	130,08	86,45	81,90	865	819

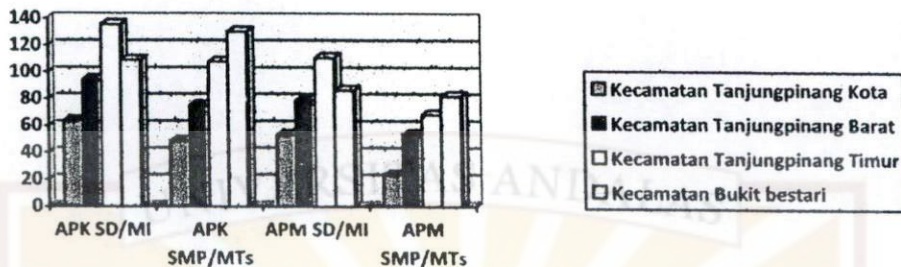
Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja pendidikan untuk masing-masing indikator yaitu APK, APM dan Angka Partisipasi Sekolah baik untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs terendah berada di Kecamatan Tanjungpinang Kota, ini disebabkan karena tingkat penghasilan penduduk pada Kecamatan Tanjungpinang Kota ini lebih rendah bila dibandingkan dari kecamatan-kecamatan lainnya, sehingga banyak anak usia sekolah baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs tidak bersekolah atau bersekolah tapi tidak sesuai antara usia dengan jenjang pendidikannya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian penduduk pada kecamatan ini sebagian besar berada pada sektor perikanan laut atau sebagai nelayan miskin yang hidup di pesisir pulau-pulau kecil dengan pemikiran yang sederhana.

Dan untuk kinerja pendidikan untuk masing-masing indikator yaitu APK, APM dan Angka Partisipasi Sekolah baik untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs angka yang tinggi berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Bukit Bestari. Hal ini disebabkan Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan suatu kecamatan yang menjadi pusat pengembangan Kota Tanjungpinang, sehingga tingkat perekonomian pada kecamatan ini juga mengalami peningkatan yang tentunya mempengaruhi dari penghasilan penduduk setempat dan berpengaruh juga terhadap kemampuan dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, layaknya suatu daerah maju, dengan penduduk yang berpikiran maju tentunya lebih sadar betapa pentingnya arti pendidikan.

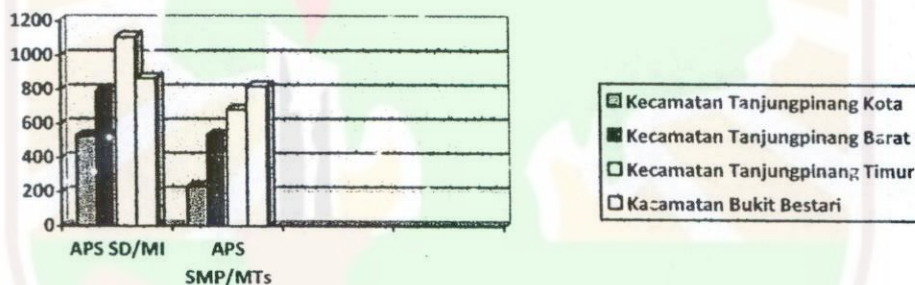
Untuk lebih rincinya melihat gap (kesenjangan) dari kinerja pendidikan dengan indikator APK, APM dan Angka Partisipasi Sekolah baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs dari masing-masing kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang tahun 2009 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.4. APK dan APM Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009.



Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Diolah

Gambar 4.5 Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009.



Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Diolah

4.2.2 Analisis Gap (Kesenjangan) Pelayanan Pendidikan Dasar Di Kota Tanjungpinang Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam menganalisis gap antara kondisi pendidikan yang telah dilaksanakan untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs dengan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi, indikator yang digunakan adalah APM (Angka Partisipasi Murni), APS (Angka Putus Sekolah), pemenuhan sarana dan prasarana, memiliki tenaga kependidikan non guru, jumlah guru yang diperlukan terpenuhi, kualifikasi guru S1, siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap, jumlah siswa per kelas dan lulusan melanjutkan ke jenjang berikutnya, sedangkan untuk indikator

siswa dengan nilai memuaskan dalam uji sampel mutu pendidikan tidak dibahas karena Kota Tanjungpinang belum mengikuti uji sampel tersebut.

4.2.2.1 Analisis APM (Angka Partisipasi Murni)

Berdasarkan dari hasil pembahasan kinerja pendidikan dengan indikator APM untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs diatas, dapat dilihat pada tabel 4.13 (hal. 75) untuk tahun 2006 – 2009 dan tabel 4.14 (hal. 77) untuk masing-masing kecamatan di Kota Tanjungpinang tahun 2009. Dan apabila dibandingkan dengan SPM yang harus dipenuhi sesuai dengan Kepmendikas RI No. 129a/U/2004 untuk indikator APM dimana tingkat SD/MI angka APM nya adalah 95 %, maka hanya tahun 2008 yang mampu mencapai SPM yaitu 98,11 % sedangkan tahun-tahun lainnya tidak mencapai SPM. Dan dari tahun 2006 – 2009 tersebut, lebih parahnya lagi angka APM yang terendah justru pada tahun 2009 yaitu 84,21%, padahal setiap tahun pemerintah terus melakukan peningkatan terhadap anggaran pendidikan. Hal ini disebabkan banyaknya program dibidang pendidikan yang tidak tepat sasaran dan anggaran pendidikan lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai yaitu untuk gaji pegawai dan guru. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 5 tahunan Kota Tanjungpinang tahun 2006 – 2009 diperoleh data bahwa selama tahun 2006 -2008 pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kegiatan penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan penyediaan dana pembebasan biaya pendidikan dasar sembilan tahun. Tetapi pada tahun 2009 kegiatan penyediaan dana pembebasan biaya pendidikan dasar sembilan tahun ini tidak dijadikan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun lagi tetapi dimasukkan dalam program manajemen pelayanan

pendidikan untuk kegiatan penyediaan beasiswa pendidikan dimana dari kegiatan ini, yang ingin dicapai adalah mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu. Dengan demikian yang tadinya dari tahun 2006-2009 dana yang dianggarkan untuk program wajib belajar sembilan tahun (untuk siswa tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs) tapi pada tahun 2009 dana tersebut dibagi untuk bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu, sehingga jumlah dana yang digunakan untuk membantu siswa tingkat SD/MI dan SMP/MTs menjadi berkurang. Salah satu hal ini lah yang menyebabkan APM pada tahun 2009 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena hal tersebut menyebabkan ada anak usia sekolah yang belum bersekolah atau bersekolah pada usia yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan. Begitu juga apabila dibandingkan antara APM tingkat SMP/MTs yang telah dicapai Kota Tanjungpinang dengan APM target dari SPM, dari tahun 2006 -2009 belum satupun yang mencapai SPM sebesar 90%. Artinya masih banyak penduduk usia 13-15 tahun yang belum terlayani atau masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Dan sama halnya dengan tingkat SD/MI, SPM tingkat SMP/MTS justru terendah pada tahun 2009 yaitu 60,91%. Dengan pemerintah tidak menganggarkan lagi untuk kegiatan dana pembebasan biaya pendidikan dasar sembilan tahun, maka akan semakin banyak anak usia sekolah yang belum bersekolah dan semakin banyak anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.

Jadi dengan capaian APM masih dibawah SPM yang harus dipenuhi, artinya kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang selama tahun 2006 -2009 masih dibawah standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Dengan kata lain program nasional penuntasan wajib belajar sembilan tahun untuk Kota Tanjungpinang belum tercapai.

4.2.2.2 Analisis APS (Angka Putus Sekolah)

Selama tahun 2006 – 2009 untuk tingkat SD/MI terdapat jumlah siswa yang putus sekolah sebanyak 10 orang, 6 orang, 9 orang dan 10 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa maka persentase putus sekolah menunjukkan angka dari tahun 2006-2009 masing-masing adalah 0,05%, 0,03%, 0,05 % dan 0,05%. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa untuk tingkat SD/MI telah memenuhi bahkan melampaui SPM yaitu dibawah 1%. Begitu juga untuk angka persentase putus sekolah untuk tingkat SMP/MTs dari tahun 2006-2009 menunjukkan angka telah melampaui SPM atau berada dibawah 1% yaitu masing-masing, 0,09%, 0,36%, 0,13% dan 0,09% atau 7 orang, 30 orang ,11 orang dan 8 orang.

Apabila dilihat dari angka putus sekolah ini, dapat dikatakan pemerintah Kota Tanjungpinang cukup berhasil dalam menekan jumlah siswa tingkat SD/MI maupun SMP/MTs yang putus sekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD/MI ataupun pada tingkat SMP/MTs. Artinya pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2006-2009 telah mencapai SPM dalam memberikan pelayanan pendidikan untuk indikator APS (Angka Putus Sekolah) baik untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs, hal ini disebabkan salah satunya adalah pemerintah menganggarkan dana pendidikan untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kegiatan penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan penyediaan dana pembebasan biaya pendidikan dasar sembilan tahun.

4.2.2.3 Analisis Pemenuhan Sarana Dan Prasarana

Analisis kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan dengan membandingkan antara SPM yang harus dipenuhi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan sampai dengan tahun 2009. Adapun yang dimaksud sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dan prasarana yaitu meliputi sekolah, ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, UKS dan laboratorium serta ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Tabel 4.17 Jumlah Sekolah, Ruang Kelas Dan Fasilitas SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2009.

NO	Kecamatan	Sekolah	Ruang Kelas	Perpustakaan	Lapangan Olahraga	Lainnya
1	Tanjungpinang Kota	12	92	11	4	1
2	Tanjungpinang Barat	17	127	14	5	1
3	Tanjungpinang Timur	15	138	11	5	2
4	Bukit Bestari	20	156	15	4	2
5	Jumlah	64	513	51	18	6

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009.

Dari perbandingan jumlah siswa yang ada untuk masing-masing kecamatan dengan jumlah sekolah yang dibangun dan dimanfaatkan (Tabel 4.6 hal.68) diperoleh hasil perhitungan bahwa terdapat kekurangan sebanyak 25 ruang kelas, tetapi walaupun demikian hal itu tidak mengganggu dalam proses belajar karena kalau dirata-ratakan dari jumlah sekolah SD/MI dengan rasio siswa per kelas 31 orang dan ruang kelas yang ada dibandingkan dengan kelas (rombel) maka satu sekolah SD/MI memiliki 8 ruang kelas dan 11 kelas (rombel) artinya satu sekolah membutuhkan 3 ruang kelas lagi. Dan untuk mengantisipasi kondisi tersebut

sekolah memberlakukan 2 shift ruang kelas yaitu satu ruang kelas dimanfaatkan oleh lebih dari satu rombongan belajar, biasanya untuk kelas satu dan dua digunakan satu ruang kelas yang sama dengan cara ada yang masuk pagi dan masuk siang. Tetapi apabila rasio siswa per kelas 40 orang, maka untuk Kota Tanjungpinang kekurangan kelas sebanyak 25 ruang kelas.

Apabila dilihat dari kondisi ruang kelas 92,20% ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik dan hanya 0,97% rusak berat. Adapun ruang kelas yang dalam kondisi rusak berat itu terdapat di Kecamatan Tanjungpinang Kota, dimana pada kecamatan ini bila dilihat dari kebutuhan ruang kelas berdasarkan SPM ternyata ada kelebihan 21 ruang kelas artinya masih ada ruang kelas yang layak untuk menampung jumlah siswa yang ada. Secara umum hal ini menunjukkan masih terdapat kelebihan ruang kelas meskipun telah dikurangi dengan ruang yang tidak dapat digunakan akibat rusak berat. Dan untuk meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya memperbaiki kondisi ruang kelas dengan setiap tahun dianggarkannya belanja pemeliharaan dan perbaikan untuk bangunan/ruang kelas SD/MI. Dan secara umum apabila dirata-ratakan berarti pencapaian kinerja pendidikan dalam pemenuhan ruang kelas telah mencapai 95,35%, ini berarti telah memenuhi SPM sebesar 90%.

Selain itu juga pada tahun 2009 sekolah tingkat SD/MI masih kekurangan perpustakaan sebanyak 13 unit dan baru 6 sekolah yang memiliki lapangan olah raga artinya masih kekurangan 58 lapangan olah raga. Dan bila dibandingkan dengan SPM dalam pemenuhan prasarana perpustakaan, pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2009 hanya mampu mencapai sebesar 79,69% ini berarti belum semua SD/MI memiliki perpustakaan, padahal dengan adanya perpustakaan sangat membantu dalam proses belajar selain itu juga akan

menumbuhkan minat membaca dari usia dini. Dengan capaian hanya sebesar 79,69% untuk pemenuhan fasilitas perpustakaan artinya belum mencapai SPM sebesar 90%. Begitu juga terhadap pemenuhan prasarana lapangan olah raga hanya mampu mencapai 28,13% atau hanya 18 dari 64 SD/MI yang memiliki lapangan olah raga dan biasanya untuk kegiatan olah raga dilakukan di perkarangan sekolah yang sekaligus berfungsi sebagai tempat upacara bendera. Dengan capaian 28,13% tersebut sangat jauh dari pencapaian SPM sebesar 90%. Pada tabel 4.18 dan 4.20 dibawah menjelaskan bahwa berapa jumlah ruang kelas, perpustakaan dan lapangan olah raga yang harus tersedia menurut SPM dan dibandingkan dengan fasilitas sekolah yang telah ada, selanjutnya akan diketahui apakah fasilitas sekolah tersebut telah mencapai target SPM atau tidak. Tabel 4.18 dan 4.20 juga memperlihatkan berapa jumlah kelebihan atau kekurangan fasilitas sekolah tersebut bila dibandingkan dengan target SPM.

Tabel 4.18 Jumlah Ruang Kelas, Perpustakaan dan Lapangan Olah Raga Tingkat SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Berdasarkan SPM.

No	Kecamatan	Ruang Kelas		Perpustakaan		Lapangan Olah Raga	
		SPM	Lebih/ Kurang	SPM	Lebih/ Kurang	SPM	Lebih/ Kurang
1	Tanjungpinang Kota	71	21	12	-1	12	-11
2	Tanjungpinang Barat	131	-4	17	-3	17	-16
3	Tanjungpinang Timur	170	-32	15	-4	15	-13
4	Bukit Bestari	166	-10	20	-5	20	-18
5	Jumlah	538	-25	64	-13	64	-58

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Data Diolah

Sedangkan untuk melihat pencapaian SPM terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2009, dapat dianalisis sekolah, ruang kelas dan kelas (rombel) yang ada dibandingkan dengan jumlah siswa, selain itu juga dapat dilihat dari fasilitas sekolah yang tersedia yaitu perpustakaan, lapangan olah raga, UKS dan laboratorium.

Tabel 4.19 dibawah ini menunjukkan jumlah sekolah tingkat SMP/MTs yang ada di setiap kecamatan Kota Tanjungpinang beserta fasilitas pendukung sekolah lainnya, yang merupakan sarana dan prasarana yang wajib dimiliki setiap sekolah.

Tabel 4.19 Jumlah Sekolah, Ruang Kelas Dan Fasilitas SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009.

NO	Kecamatan	Sekolah	Ruang Kelas	Perpustakaan	Lapangan Olahraga	UKS	Lab.	Lainnya
1	Tanjungpinang Kota	5	40	4	3	-	8	8
2	Tanjungpinang Barat	5	60	4	4	3	12	4
3	Tanjungpinang Timur	6	68	6	5	4	11	6
4	Bukit Bestari	9	106	8	5	5	18	10
5	Jumlah	25	274	22	17	12	49	28

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009.

Tabel 4.20 Jumlah Ruang Kelas, Perpustakaan, Lapangan Olah Raga, UKS dan Laboratorium Tingkat SMP/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Berdasarkan SPM.

No	Kecamatan	Ruang Kelas		Perpustakaan		Lapangan Olah Raga		UKS		Lab.	
		SPM	Lbh/krng	SPM	Lbh/Krng	SPM	Lbh/Krng	SPM	Lbh/krng	SPM	Lbh/Krng
1	Tanjungpinang Kota	24	16	5	-1	5	-2	5	-5	10	-2
2	Tanjungpinang Barat	52	8	5	-1	5	-1	5	-2	10	2
3	Tanjungpinang Timur	65	3	6	0	6	-1	6	-2	12	-1
4	Bukit Bestari	92	14	9	-1	9	-4	9	-4	18	0
5	Jumlah	233	41	25	-3	25	-8	25	-13	50	-1

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Data Diolah

Dari perbandingan jumlah siswa yang ada untuk masing-masing kecamatan dengan jumlah sekolah/ ruang kelas yang dibangun dan dimanfaatkan diperoleh hasil perhitungan bahwa terdapat kelebihan 41 ruang kelas, hal itu terjadi apabila jumlah rombongan belajar maksimal dengan jumlah 40 siswa perkelas, tetapi dengan rasio rata-rata per kelas pada tahun 2009 sebanyak 37 siswa per kelas

maka jumlah ruang kelas mencukupi dari jumlah kelas (rombel) yang ada. Artinya bahwa pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2009 telah mencapai SPM sebesar 90% yaitu sebesar 117,60%.

Dan untuk fasilitas perpustakaan, lapangan olah raga, UKS dan laboratorium masing-masing telah terpenuhi sebesar 88%, 68%, 48% dan 196%. Artinya hanya untuk pemenuhan fasilitas laboratorium yang telah mencapai SPM sebesar 90%, sedangkan pemenuhan fasilitas yang lainnya belum mencapai SPM karena masih dibawah 90%.

4.2.2.4 Memiliki Tenaga Kependidikan Non Guru

Tenaga kependidikan non guru ini untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya yaitu kegiatan tata usaha. Indikator SPM untuk tenaga kependidikan non guru ini hanya untuk tingkat SMP/MTs yaitu 80% sekolah harus memiliki tenaga kependidikan non guru, sedangkan di tingkat SD/MI SPM tidak ditetapkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan sekretaris dinas pendidikan dan olah raga Kota Tanjungpinang bahwa 100% sekolah tingkat SMP/MTs memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya yaitu kegiatan tata usaha. Jadi untuk indikator ini telah tercapai dari target SPM sebesar 80%.

4.2.2.5 Analisis Jumlah Guru yang Diperlukan Terpenuhi

Analisis kebutuhan guru SD/MI mengacu pada PP No.19 tahun 2005 dimana satu SD/MI minimal memiliki 6 guru kelas, 1 orang guru olah raga, 1 orang guru agama dan 1 orang kepala sekolah sehingga satu SD/MI dibutuhkan 9

guru. Berdasarkan dari profil pendidikan Kota Tanjungpinang untuk tahun 2009, dapat dianalisis kebutuhan guru dan selanjutnya dibandingkan antara jumlah guru yang ada dengan jumlah guru menurut SPM.

Tabel 4.21 Jumlah Kebutuhan Guru SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Berdasarkan Jumlah Sekolah Yang Ada Dibandingkan Dengan Jumlah Sekolah Menurut SPM.

NO	Kecamatan	Sekolah	Kelas (Rombel)	Jumlah Guru	Jumlah Guru	
					SPM	Lbh/ Krag
1	Tanjungpinang Kota	12	108	228	144	84
2	Tanjungpinang Barat	17	166	365	217	148
3	Tanjungpinang Timur	15	208	450	253	197
4	Bukit Bestari	20	223	474	283	191
5	Jumlah	64	705	1.517	897	620

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Data Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah guru terbanyak terdapat pada Kecamatan Bukit Bestari, ini sebanding dengan jumlah sekolah dan jumlah kelas (rombel) yang jumlahnya banyak bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Sebaliknya untuk Kecamatan Tanjungpinang Kota, memiliki jumlah guru yang paling sedikit karena pada kecamatan ini memiliki SD/MI dan kelas (rombel) yang paling sedikit pula. Ini berarti pada Kota Tanjungpinang, guru terdistribusi merata sesuai dengan kebutuhan sekolah yang ada.

Dengan jumlah guru sebanyak 1.517 orang ternyata telah mencukupi ketersediaan guru untuk mengajar pada 64 SD/MI yang memiliki 705 kelas (rombel) yang tersebar di Kota Tanjungpinang. Artinya tidak adanya hambatan dalam proses belajar karena kekurangan guru yang mengajar, ini berarti setiap sekolah selain memiliki kepala sekolah juga memiliki guru kelas untuk masing-masing kelas ditambah dengan guru yang mengajar mata pelajaran agama dan

guru mata pelajaran olah raga. Bila dihitung dari kebutuhan guru menurut SPM telah telah terjadi kelebihan jumlah guru sebanyak 620 orang yang tersebar di 64 SD/MI di Kota Tanjungpinang. Dimana menurut SPM dengan jumlah sekolah dan kelas (rombel) yang ada ditambah kepala sekolah dan guru mata pelajaran agama dan olah raga maka Kota Tanjungpinang minimal harus memiliki jumlah guru SD/MI sebanyak 897 orang. Jadi untuk indikator SPM jumlah guru yang diperlukan, maka Kota Tanjungpinang telah mencapai target SPM sebesar 90% dari jumlah guru yang diperlukan dipenuhi yaitu 169,12%.

Untuk menganalisis jumlah kebutuhan guru untuk SMP/MTs berbeda dengan cara menghitung kebutuhan guru pada tingkat SD/MI. Dengan mengacu pada PP No.19 Tahun 2005, kebutuhan guru didasarkan pada jumlah jam pelajaran/minggu yaitu 34 jam/minggu dikali dengan jumlah kelas yang ada dibagi dengan jumlah jam pelajaran minimum seorang guru (18 jam/minggu). Perhitungan untuk jumlah guru yang diperlukan sulit dilakukan karena adanya sekolah yang memiliki lebih dari 9 kelas atau rombongan belajar. Idealnya satu SMP/MTs memiliki 9 ruang kelas dengan 270 siswa dan jam pelajaran 34 jam/minggu. Akan dapat diketahui bahwa untuk tingkat SMP/MTs membutuhkan 17 orang guru ditambah dengan 1 orang kepala sekolah.

Berdasarkan jumlah kelas yang ada pada tahun 2009 yaitu sebanyak 260 kelas, maka total waktu mengajar berjumlah 8.840 jam, jika jumlah ini di bagi dengan jam minimal seorang guru mengajar yaitu 18 jam/minggu maka seharusnya guru mengajar pada tingkat SMP/MTs berjumlah 491 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah guru yang ada ternyata terdapat kelebihan guru pada tingkat SMP/MTs sebanyak 177 orang yang tersebar pada Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.22 Jumlah Kebutuhan Guru SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Berdasarkan Jumlah Sekolah Yang Ada Dibandingkan Dengan Jumlah Sekolah Menurut SPM.

NO	Kecamatan	Sekolah	Kelas (Rombel)	Jumlah Guru	Jumlah Guru	
					SPM	Lbh/Krng
1	Tanjungpinang Kota	5	32	87	61	26
2	Tanjungpinang Barat	5	55	145	104	41
3	Tanjungpinang Timur	6	69	169	131	38
4	Bukit Bestari	9	104	267	195	72
5	Jumlah	25	260	668	491	177

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Data Diolah

Dari tabel tersebut juga memperlihatkan jumlah guru SMP/MTs yang terbanyak terdapat pada Kecamatan Bukit Bestari hal ini sesuai dengan jumlah sekolah dan kelas (rombel) pada Kecamatan Bukit Bestari juga memiliki jumlah yang terbanyak bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Begitu juga untuk jumlah guru yang paling sedikit, terdapat pada Kecamatan Tanjungpinang Kota karena pada kecamatan tersebut juga memiliki sekolah dan kelas (rombel) yang paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah guru bila dibandingkan dengan jumlah sekolah dan kelas (rombel) yang ada maka di Kota Tanjungpinang, guru pada tingkat SMP/MTs telah terdistribusi secara merata sesuai dengan kebutuhan sekolah yang ada.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata jam mengajar guru yang ada sampai dengan tahun 2009 dapat diketahui bahwa satu orang guru pada saat ini memiliki jam mengajar 13,23 jam/minggu, jam mengajar ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jam wajib yang harus dipenuhi yaitu minimal 18 jam/minggu. Hal ini berarti untuk tingkat SMP/MTs kebutuhan guru terhadap jumlah sekolah dan kelas (rombel) telah terpenuhi.

Selain melihat dari jumlah guru yang ada dibandingkan dengan jumlah sekolah dan kelas (rombel), kebutuhan dan pendistribusian guru juga dapat dilihat dari latar belakang program studi guru tersebut. Distribusi guru menurut latar belakang program studi hanya dapat dilihat pada tingkat SMP/MTs. Jumlah guru SMP/MTs pada tahun 2009 sebanyak 668 orang dengan latar belakang program studi sebagai berikut : 89 orang (13,32%) berlatar belakang PPKN dan pendidikan agama, 131 orang (19,61%) bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 39 orang (5,84%) pendidikan jasmani, 268 (40,12%) matematika dan IPA, 72 orang (10,78%) IPS, 47 orang (7,04%) seni dan BP dan 22 orang (3,30%) lain-lain.

Untuk mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jumlah jam belajar setiap minggu masing-masingnya 4 jam/minggu. Jika jumlah kelas untuk tingkat SMP/MTs saat ini berjumlah 260 kelas dikali dengan 20 jam (5 mata pelajaran x 4 jam/minggu) sehingga berjumlah 5.200 jam dan dibagi dengan jumlah guru sebanyak 471 orang maka untuk masing-masing guru mata pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika rata-rata mengajar 11,04 jam/ minggu, masih dibawah jam wajib seorang guru yaitu 18 jam/ minggu. Angka ini menunjukkan jumlah guru untuk mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia telah mencukupi atau tidak terdapat masalah yang berarti terhadap distribusi guru menurut latar belakang program studi, tanpa mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang telah ditempuh.

Dan bila kita bandingkan dengan capaian SPM terhadap jumlah guru yang diperlukan terpenuhi dengan tingkat capaian 90% untuk tingkat SMP/MTs, maka jumlah guru SMP/MTs pada Kota Tanjungpinang telah mencapai 136,05% melebihi dari target SPM, artinya terjadi kelebihan guru pada tingkat SMP/MTs

atau banyak guru yang mengajar kurang dari jam wajib mengajar seorang guru yaitu minimal 18 jam/minggu. Dan untuk itu perlu adanya kegiatan untuk mengoptimalkan fungsi dari guru.

4.2.2.6 Analisis Kualifikasi Guru

Baik tingkat SD/MI maupun SMP/MTs didalam indikator SPM mengharuskan 90% guru SD/MI dan guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 serta PP No. 19 Tahun 2005, tentang guru dan dosen yaitu seorang guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimum diploma IV atau S1 dengan latar belakang pendidikan tinggi, kependidikan, psikologi dan memiliki sertifikasi profesi guru.

Tabel 4.23 Jumlah Guru SD/MI Kota Tanjungpinang Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2009.

No	Kecamatan	Jumlah Guru	Guru Menurut Ijazah Tertinggi						
			< SMA	SMA	DI	DII	DIII	S1	S2
1	Tanjungpinang Kota	228	42	42	-	112	2	29	1
2	Tanjungpinang Barat	365	59	62	-	175	19	50	-
3	Tanjungpinang Timur	450	78	78	1	202	6	85	-
4	Bukit Bestari	474	70	81	2	233	29	59	-
5	Jumlah	1.517	249	263	3	722	56	223	1

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009.

Sampai dengan tahun 2009 jumlah guru SD/MI di Kota Tanjungpinang sebanyak 1.517 orang dari jumlah tersebut 249 orang (16,41%) berpendidikan di bawah SLTA, 263 orang (17,34%) berpendidikan SLTA, 3 orang (0,20%) berpendidikan DI, 722 orang (47,59%) berpendidikan DII, 56 orang (3,69) berpendidikan DIII, 233 orang (14,70%) berpendidikan S1 dan 1 orang (0,066%)

berpendidikan S2. Dengan tingkat pendidikan guru SD/MI yang berijazah S1 dan S2 hanya berjumlah 234 orang (14,766%), maka pemerintah Kota Tanjungpinang dihadapkan pada masalah dalam peningkatan guru dengan kualifikasi guru SD/MI menjadi S1 sebanyak 84,57% lagi atau sebanyak 1.283 orang.

Apabila dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2006 -2009 diperoleh data bahwa pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengalokasikan dana untuk program peningkatan kualifikasi guru SD/MI menjadi S1 pada tahun 2006 dengan jumlah guru SD/MI mengikuti program S1 sebanyak 91 orang. Pada tahun 2007 pemerintah daerah Kota Tanjungpinang telah mengalokasikan dana sebesar Rp 880.160.000 untuk peningkatan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kualifikasi, tetapi pada tahun 2008 dan 2009 pemerintah Kota Tanjungpinang tidak lagi mengalokasikan dana untuk program peningkatan kualifikasi guru tersebut. Program yang ada pada tahun 2008 untuk peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu hanya kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik, pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dan pendidikan lanjutan bagi tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kualifikasi untuk pendidikan lanjutan S2 tenaga struktural dengan anggaran Rp 156.985.000.

Tetapi walaupun pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mengalokasikan lagi secara langsung dana untuk peningkatan kualifikasi guru pada tahun 2008 dan 2009, pada dua tahun ini pemerintah mengalokasikan dana untuk kegiatan penyediaan beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, masing masing sebesar Rp 1.183.465.000 untuk tahun 2008 dan Rp 1.535.195.000 untuk tahun 2009. Adapun pendistribusian beasiswa pendidikan tersebut berdasarkan

pengajuan proposal bantuan pendidikan yang masuk. Mulai dari tahun 2008, peningkatan kualifikasi guru merupakan program gabungan pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris dinas pendidikan Kota Tanjungpinang, bantuan yang diberikan kepada guru yang sedang melanjutkan pendidikan sebesar Rp 2.000.000 dari APBN Provinsi Kepulauan Riau dan Rp 3.000.000 dari APBD Provinsi Kepulauan Riau per guru.

Berarti pada tahun 2009 pemerintah masih memiliki masalah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru SD/MI yaitu 263 orang dari SLTA ke S1, 3 orang dari DI ke S1, 722 orang dari DII ke S1, 56 orang dari DIII ke S1. Dan bila dilihat dari SPM yang mengharuskan guru SD/MI memiliki kualifikasi DIV atau S1, maka Kota Tanjungpinang masih sangat jauh ketinggalan karena guru SD/MI di Kota Tanjungpinang memiliki guru dengan kualifikasi S1 hanya sebesar 15,36%.

Tabel 4.24 Jumlah Guru SMP/MTs Kota Tanjungpinang Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Guru	Guru Menurut Ijazah Tertinggi					
			SMA	DI	DII	DIII	S1	S2
1	Tanjungpinang Kota	87	12	2	4	10	59	-
2	Tanjungpinang Barat	145	7	14	11	56	54	3
3	Tanjungpinang Timur	169	14	15	14	54	72	-
4	Bukit Bestari	267	15	10	24	78	140	-
5	Jumlah	668	48	41	53	198	325	3

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009.

Sampai dengan tahun 2009 jumlah guru pada tingkat SMP/MTs di Kota Tanjungpinang sebanyak 668 orang, dari jumlah tersebut 48 orang (7,19%) berpendidikan SLTA, 41 orang (6,14%) berpendidikan DI, 53 orang (7,92%)

berpendidikan DII, 198 orang (29,64%) berpendidikan DIII, 325 orang (48,65%) berpendidikan S1 dan 3 orang (0,45%) berpendidikan S2. Berarti pemerintah daerah daerah harus meningkatkan kualifikasi guru SMP/MTs ini ke jenjang S1 yaitu sebanyak 340 orang (50,90%) dengan rincian 48 orang dari SLTA ke S1, 41 orang dari DI ke S1, 53 orang dari DII ke S1, 198 orang dari DIII ke S1.

Sama halnya dengan guru SD/MI pencapaian SPM untuk kualifikasi guru pada SMP/MTs juga belum mencapai SPM yang mengaruskan guru SMP/MTs memiliki kualifikas pendidikan DIV atau S1 sebanyak 90%. Dan pemerintah Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2009 baru memiliki kualifikasi guru SMP/MTs berpendidikan S1 sebanyak 325 orang atau baru mencapai 48,65%. Dan ini merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian bagi pemerintah Kota Tanjungpinang.

4.2.2.7 Ketersediaan Buku Pelajaran Yang Lengkap

Untuk tingkat SD/MI SPM mengharuskan 95% siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran. Memiliki buku pelajaran yang lengkap dapat berupa buku yang tersedia didalam perpustakaan. Ketersediaan buku pelajaran atau rasio buku-siswa biasanya dapat dilihat dari banyaknya buku untuk setiap mata pelajaran yang tersedia di perpustakaan. Berdasarkan dari analisis prasarana yang dimiliki oleh sekolah yaitu adanya fasilitas perpustakaan ternyata belum semua sekolah baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs memiliki perpustakaan. Sekolah yang ada kurang memperhatikan pentingnya perpustakaan bagi siswa khususnya bagi siswa yang tidak mampu membeli buku pelajaran guna menunjang kelancaran proses belajar.

Di Kota Tanjungpinang SD/MI yang memiliki perpustakaan sebanyak 79,69% dari 64 SD/MI yang ada atau sebanyak 51 SD/MI, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs sebanyak 22 sekolah memiliki perpustakaan atau 88% dari 25 SMP/MTs yang tersebar di Kota Tanjungpinang. Rasio buku-siswa tidak dapat diketahui karena tidak adanya data yang lengkap mengenai jumlah buku yang ada di perpustakaan.

Berdasarkan data yang ada pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2006 pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui kegiatan pengadaan buku teks mata pelajaran/ bahan pembelajaran yaitu buku keterampilan/ life skill SD/MI untuk 27 sekolah, buku pelajaran pokok SD 8 judul untuk 65 sekolah. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dilakukan pemerintah pada tahun 2007 yang berhubungan dengan pemenuhan buku pelajaran yang lengkap bagi siswa yaitu adanya kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa berupa pengadaan buku fisika, buku biologi, buku geografi, buku bahasa Inggris SD, buku keagamaan SD maupun SMP, buku sejarah, buku IPS SD, buku ekonomi dan keuangan, buku sains SD, buku pendidikan jasmani SD maupun SMP serta buku kewarganegaraan SMP dan buku life skill SD yang masing-masing jumlahnya sebanyak 2.500 exemplar. Pada tahun 2008 dan 2009 tidak adanya alokasi anggaran dalam peningkatan jumlah buku. Dan kalau dirata-ratakan jumlah buku terhadap pemenuhan kebutuhan buku untuk mata pelajaran ketrampilan sebesar 42,19% dan 100% untuk buku pelajaran pokok lainnya untuk tingkat SD/MI. Sedangkan untuk SMP/MTs pengadaan buku, baru memenuhi 28,90% untuk mata

pelajaran fisika, biologi, geografi, agama, sejarah, ekonomi dan keuangan serta pendidikan jasmani.

Sebenarnya pemenuhan kebutuhan akan buku pelajaran mulai menjadi program pemerintah sejak adanya dana BOS BUKU dari pemerintah pusat yang dialokasikan pada seluruh SD/MI dan SMP/MTs di Kota Tanjungpinang, tetapi sangat sulit untuk menghitung berapa jumlah buku yang telah terpenuhi karena tidak adanya data yang lengkap.

4.2.2.8 Analisis Jumlah Siswa Perkelas

Didalam SPM jumlah siswa perkelas baik untuk tingkat SD/MI ataupun tingkat SMP/MTs menyebutkan jumlah siswa perkelas antara 30-40 siswa. Dan berdasarkan data profil pendidikan Kota Tanjungpinang pada tabel 4.6 (hal. 68) dan tabel 4.11 (hal. 72) menunjukkan rata-rata jumlah siswa perkelas dari tahun 2006-2009 untuk tingkat SD/MI sebanyak 31 orang dan untuk tingkat SMP/MTs sebanyak 37 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa perkelas baik untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs di Kota Tanjungpinang telah memenuhi standar pelayanan minimal. Dan melihat dari tingkat kepadatan siswa didalam kelas, baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs masih bisa menambah jumlah siswa perkelas.

4.2.2.9 Analisis Lulusan Melanjutkan Ke jenjang Berikutnya

SPM untuk lulusan melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk tingkat SD/MI yang harus dipenuhi adalah 95% dari lulusan SD/MI melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dan 70% dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan cara membandingkan jumlah siswa yang

melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang lulus pada tingkat sebelumnya maka akan diperoleh persentase angka melanjutkan.

Tabel 4.25 Jumlah Lulusan dan Siswa Baru Tingkat I SD/MI, SMP/MTs dan SMA/ MA dan SMK Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009.

No	Tahun	Lulusan		Siswa Baru		
		SD/MI	SMP/MTs	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
1	2006	2850	2467	2893	1415	1347
2	2007	2920	1957	2957	1179	1282
3	2008	3033	2473	3213	1556	1629
4	2009	3090	2058	3188	1849	1938

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009.

Dari data diatas dapat dihitung persentase siswa yang melanjutkan dari tingkat SD/MI ke tingkat SMP/MTs pada tahun 2006-2009 adalah 101,51%, 101,23%, 105,94% dan 103,17%. Untuk tingkat SMP/MTs yang melanjutkan ke tingkat SMA/MA pada tahun 2006-2009 yaitu 57,36%, 60,25%, 62,92% dan 89,84% dan yang melanjutkan ke tingkat SMK sebanyak 54,60%, 65,50%, 65,87% dan 94,17%. Apabila dilihat dari angka yang melanjutkan pada tingkat SD/MI melebihi dari angka 100% mulai dari tahun 2006-2009, angka ini menunjukkan bahwa jumlah siswa yang terdaftar di SMP/MTs melebihi dari jumlah siswa yang lulus pada tingkat SD/MI pada tahun yang sama, ini menandakan bahwa jumlah siswa baru yang terdaftar di tingkat SMP/MTs bukan hanya berasal dari siswa yang lulus SD/MI di Kota Tanjungpinang tetapi juga berasal dari daerah lain. Sedangkan untuk angka melanjutkan dari tingkat SMP/MTs ke tingkat SMA/MA/SMK menunjukkan angka yang cenderung naik dari tahun 2006-2009. Dan bila dibandingkan dengan SPM untuk lulusan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya baik untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs Kota Tanjungpinang telah mencapai target dari SPM.

Hasil analisis terhadap gap (kesenjangan) yang terjadi atas pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun yang telah dilaksanakan di Kota Tanjungpinang untuk tahun 2009 dengan seluruh indikator yang tertuang didalam SPM dapat disimpulkan pada tabel 4.26 berikut ini.

Tabel 4.26 Gap (Kesenjangan) Antara Kinerja Pelayanan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Dengan SPM menurut Kepmendiknas RI No.129a/U/2004

No	Indikator	SD/MI		SMP/MTs	
		Capaian	SPM	Capaian	SPM
1	APM (Angka Partisipasi Murni)	84,21%	95%	60,91%	90%
2	APS (Angka Putus Sekolah)	0,05%	≤1%	0,09%	≤1%
3	Pemenuhan Sarana dan Prasarana		90%		90%
	a. Ruang Kelas	95,35%		117,60%	
	b. Perpustakaan	79,69%		88%	
	c. Lapangan Olahraga	28,13%		68%	
	d. UKS	-		48%	
	e. Laboratorium	-		196%	
4	Memiliki Tenaga Kependidikan Non Guru	-	-	100%	80%
5	Jumlah Guru Terpenuhi	169,12%	90%	136,05%	90%
6	Kualifikasi Guru S1	14,70%	90%	48,65%	90%
7	Siswa Memiliki Buku Pelajaran Yang lengkap	71,10%	95%	28,90%	100%
8	Jumlah Siswa Perkelas	31	30-40	37	30-40
9	Melanjutkan Kejenjang Berikutnya	103,17%	95%	94,17%	70%

Sumber : Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 9 indikator SPM, ada 4 indikator SPM yang belum terpenuhi yaitu APM baik untuk tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, pemenuhan sarana dan prasarana untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs yaitu perpustakaan, lapangan olahraga dan UKS, kualifikasi guru S1 untuk kedua jenjang pendidikan tersebut dan memiliki buku pelajaran yang lengkap bagi setiap siswa.

Dan dari tabel diatas, dapat juga dilihat ada 2 indikator SPM tingkat SD/MI yang melebihi dari 100% yaitu pada indikator jumlah guru yang harus dipenuhi

dan jumlah siswa SD/MI yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga untuk tingkat SMP/MTs ada 2 indikator SPM yang melebihi dari 100% yaitu jumlah ruang kelas dan jumlah guru yang harus dipenuhi. Untuk jumlah guru yang harus dipenuhi baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs yang capaiannya melebihi dari 100% menunjukkan bahwa adanya kelebihan guru untuk kedua jenjang pendidikan tersebut. Dari 1.517 jumlah guru SD/MI hanya 14,70% yang berpendidikan S1 dan yang berpendidikan di bawah S1 sebanyak 85,23%. Bila kita bandingkan kelebihan guru sebanyak 69,12% dengan jumlah guru yang berpendidikan dibawah S1 sebanyak 85,23% ternyata kelebihan guru tersebut tidak diimbangi dengan jumlah guru yang berkualifikasi S1 atau dengan kata lain terjadi kelebihan guru tetapi kelebihan tersebut tidak didukung dengan kualitas guru yang mengajar. Untuk tingkat SMP/MTs, terjadi kelebihan guru sebanyak 36,05%. Bila dibandingkan dengan jumlah guru yang berpendidikan dibawah S1 sebanyak 50,89%, maka pada tingkat SMP/MTs pun kelebihan guru tersebut tidak termasuk berkualifikasi S1. Artinya, apabila dipandang dari sisi kuantitas terjadi kelebihan tetapi bila dipandang dari sisi kualitas terjadi kekurangan.

Untuk jumlah siswa yang melanjutkan kejenjang berikutnya pada tingkat SD/MI menunjukkan angka 103,17%, ini berarti jumlah siswa baru SMP/MTs lebih banyak dari jumlah siswa yang lulus pada SD/MI di tahun 2009 sebanyak 3,17%. Hal ini menunjukkan ada siswa baru pada tingkat SMP/MTs yang berasal dari luar Kota Tanjungpinang atau siswa baru yang mendaftar pada SMP/MTs bukan berasal dari lulusan SD/MI pada tahun yang sama.

Berdasarkan profil pendidikan tentang kondisi ruang kelas untuk tingkat SMP/MTs, tidak terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak berat tetapi ada 5,47% ruang kelas dalam kondisi rusak ringan. Bila dibandingkan dengan kelebihan

ruang kelas pada tingkat SMP/MTs sebanyak 17,6% maka, kelebihan ruang kelas tersebut mampu menutupi jumlah ruang kelas yang kondisinya rusak ringan. Salah satu penyebab terjadinya kelebihan ruang kelas ini adalah adanya program dan kegiatan yang selalu dianggarkan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah yaitu pembangunan ruang kelas tetapi tidak didukung dengan pembangunan fasilitas sekolah lainnya seperti perpustakaan, lapangan olah raga dan UKS. Sebenarnya kelebihan ruang kelas ini bisa dimanfaatkan untuk ruang yang dapat menunjang fasilitas sekolah seperti UKS. Selain itu dengan adanya kelebihan ruang kelas pada tingkat SMP/MTs ini, artinya sekolah bisa menambah jumlah siswa atau jumlah rombongan belajar (rombel), sehingga semua sarana dan prasarana yang ada disekolah dapat dioptimalkan.

4.2.3 Analisis Program Bidang Pendidikan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2006-2009.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tanjungpinang dari tahun 2006-2009 dapat dilihat kinerja urusan wajib pendidikan yang telah dilakukan, sasaran yang ingin dicapai adalah perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2009 dilakukan 7 program dengan 41 kegiatan. Sedangkan untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dilakukan dengan 10 kegiatan yaitu rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, pelatihan kompetensi siswa berprestasi, penyelenggaraan paket A dan setara SD, penyelenggaraan paket B dan setara SMP, Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi,

penyediaan biaya siswa bagi keluarga tidak mampu, penyelenggaraan dan pembinaan olimpiade siswa SD/SMP, penyelenggaraan UAS dan UAN, penyelenggaraan lomba pidato bahasa Inggris SD/SMP, pembangunan gedung sekolah. kegiatan yang dilaksanakan cenderung sama setiap tahunnya, yang berbeda hanya alokasi anggarannya saja. Untuk lebih jelasnya terlihat pada lampiran 3, 4, 5 dan 6.

Dari kegiatan yang dilaksanakan untuk program pendidikan dasar sembilan tahun, alokasi anggaran terbesar selama tahun 2006-2009 adalah untuk kegiatan pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dan kegiatan ini selama 4 tahun tersebut selalu menjadi prioritas utama. Dengan terus dianggarkan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah ini telah membawa Kota Tanjungpinang mencapai target SPM dalam pemenuhan sarana ruang kelas baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs. Walaupun untuk tingkat SD/MI sampai dengan tahun 2009 masih kekurangan ruang kelas sebanyak 4,65%, tetapi untuk tingkat SMP/MTs terjadi kelebihan ruang kelas terhadap jumlah rombongan belajar siswa artinya adanya ruang kelas yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Tetapi kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana ini belum memperhatikan pada kebutuhan fasilitas pendukung lainnya. Sampai dengan 2009 belum semua SD/MI dan SMP/MTs yang ada di Kota Tanjungpinang telah memiliki perpustakaan, lapangan olah raga dan UKS. Untuk pengadaan buku teks mata pelajaran hanya dianggarkan pada tahun 2006 dan 2007. Pada tahun 2008 dan 2009 tidak adanya alokasi anggaran dalam peningkatan jumlah buku. Dan kalau dirata-ratakan jumlah buku terhadap pemenuhan kebutuhan buku untuk mata pelajaran ketrampilan sebesar 42,19% dan 100% untuk buku pelajaran pokok lainnya untuk tingkat SD/MI. Sedangkan untuk

SMP/MTs pengadaan buku, baru memenuhi 28,90% untuk mata pelajaran fisika, biologi, geografi, agama, sejarah, ekonomi dan keuangan serta pendidikan jasmani. Sedangkan sampai dengan tahun 2009 tidak dianggarkan lagi, sehingga untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs untuk indikator SPM siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap Kota Tanjungpinang tidak mencapai target.

Untuk kegiatan peningkatan kualifikasi guru menjadi S1, hanya dianggarkan pada tahun 2006 yaitu peningkatan kualifikasi guru SD program S1 PGSD sebanyak 91 orang, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya tidak dianggarkan lagi. Tetapi walaupun pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mengalokasikan lagi secara langsung dana untuk peningkatan kualifikasi guru pada tahun 2008 dan 2009, pada dua tahun ini pemerintah mengalokasikan dana untuk kegiatan penyediaan beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, masing-masing sebesar Rp 1.183.465.000 untuk tahun 2008 dan Rp 1.535.195.000 untuk tahun 2009. Adapun pendistribusian beasiswa pendidikan tersebut berdasarkan pengajuan proposal bantuan pendidikan yang masuk. Mulai dari tahun 2008, peningkatan kualifikasi guru merupakan program gabungan pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris dinas pendidikan Kota Tanjungpinang, bantuan yang diberikan kepada guru yang sedang melanjutkan pendidikan sebesar Rp 2.000.000 dari APBN Provinsi Kepulauan Riau dan Rp 3.000.000 dari APBD Provinsi Kepulauan Riau per guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang program dinas pendidikan dan olah raga Kota Tanjungpinang, selama tahun 2006-2009 program-program bidang pendidikan yang telah dilaksanakan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan berdasarkan SPM, pemerintah daerah masih terfokus pada peningkatan

pencapaian angka partisipasi, serta kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah. Untuk peningkatan kualifikasi guru menjadi S1, selama ini pemerintah dihadapkan pada permasalahan kekurangan dana.

Bila dilakukan mapping antara program dan kegiatan pendidikan yang telah dilakukan selama tahun 2006-2009 dengan target pencapaian yang harus dipenuhi berdasarkan SPM, maka dari 9 indikator yang harus dipenuhi, orientasi program dan kegiatan berfokus pada 6 indikator yaitu APM 95% untuk SD/MI 90% untuk SMP/MTs, pemenuhan sarana dan prasarana, memiliki tenaga kependidikan non guru, pemenuhan jumlah kebutuhan guru, jumlah siswa perkelas 30-40 siswa, penurunan angka putus sekolah dan peningkatan persentase siswa melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Pemenuhan sarana dan prasarana masih terkendala pada fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan, lapangan olah raga dan UKS, sedangkan pemenuhan jumlah kebutuhan guru masih terkendala pada jumlah guru yang berkualifikasi S1. Sedangkan 2 indikator lainnya yang termuat didalam SPM, berupa peningkatan kualifikasi guru menjadi S1 dan pemenuhan kebutuhan buku pelajaran, walaupun telah termuat didalam program dan kegiatan pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan Kota Tanjungpinang selama tahun 2006-2009, tetapi belum mendapatkan perhatian yang serius dan diiringi alokasi anggaran yang memadai.

4.2.5 Analisis Kebutuhan Belanja Dalam Pencapaian SPM Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Tanjungpinang.

Setelah dilakukan analisis gap (kesenjangan) antara tingkat pencapaian kinerja bidang pendidikan di Kota Tanjungpinang untuk tahun 2009 terhadap target SPM, maka diketahui ada 4 indikator dari SPM yang belum tercapai yaitu

Angka Partisipasi Murni (APM) baik tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs, pemenuhan sarana dan prasarana untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs yaitu perpustakaan, lapangan olahraga dan UKS, kualifikasi guru S1 untuk kedua jenjang pendidikan tersebut dan siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap.

Untuk mencapai APM 95% pada tingkat SD/MI maka digunakan unit cost/ siswa sebesar Rp 4.493.700 dikalikan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berjumlah 2.275 orang. Dan untuk mencapai APM 90% untuk tingkat SMP/MTs maka digunakan unit cost/ siswa sebesar Rp 5.801.400,- dikali dengan jumlah penduduk usia 13-15 yang berjumlah 2.885 orang.

Untuk kebutuhan akan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, lapangan olahraga dan UKS pada tingkat SD/MI, dengan tingkat pencapaian pemenuhan kebutuhan perpustakaan 79,69%, lapangan olahraga 28,13% dan UKS 0%, maka untuk mencapai dari target SPM 90%, dibutuhkan perpustakaan sebanyak 7 unit, lapangan olahraga 40 unit dan UKS 64 unit. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs dibutuhkan 1 perpustakaan, 6 lapangan olahraga dan 11 UKS. Dengan dianggarkannya dana untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah untuk program wajib belajar 9 tahun yang mencapai 11.000.000.000 setiap tahunnya maka target SPM untuk pemenuhan sarana dan prasarana akan tercapai dalam waktu 2 tahun yaitu pada tahun 2011.

Jika pemenuhan kualifikasi guru menjadi S1 diasumsikan akan dilaksanakan selama 5 tahun maka jumlah guru SD/MTs yang akan tingkatkan kualifikasinya menjadi S1 yaitu 53 orang yang berpendidikan SLTA, 1 orang berpendidikan DI, 144 orang berpendidikan DII dan 11 orang berpendidikan DIII. Sedangkan untuk peningkatan kualifikasi guru SMP/MTs yaitu 10 orang

berpendidikan SLTA, 8 orang berpendidikan DI, 17 orang berpendidikan DII dan 40 orang berpendidikan DIII.

Pemenuhan buku pelajaran dihitung berdasarkan jumlah siswa SD/MI sebanyak 21.084 orang dikalikan 2 buku pelajaran dikalikan dengan Rp 20.000, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs sebanyak 9.915 siswa dikalikan 8 buku dikalikan Rp 20.000.

Tabel 4.27. Kebutuhan Belanja Dalam Pencapaian SPM Pendidikan Dasar

No	Keterangan	Jumlah Alokasi /Tahun
1	APM	
	A. SD/MI 2.275 x 4.493.700	10.223.167.500
	B. SMP/MTs 2.885 x 5.801.400	16.737.039.000
		26.960.206.500
2	Peningkatan Kualifikasi Guru	
	A. SD/MI	
	SLTA ke S1, 53 x 17.500.000	927.500.000
	DI ke S1, 1 x 14.000.000	14.000.000
	DII ke S1, 144 x 10.500.000	1.512.000.000
	DIII ke S1, 11 x 7.000.000	77.000.000
	B. SMP/MTs	
	SLTA ke S1, 10 x 17.500.000	175.000.000
DI ke S1, 8 x 14.000.000	112.000.000	
DII ke S1, 11 x 10.500.000	115.500.000	
DIII ke S1, 40 x 7.000.000	280.000.000	
		3.213.000.000
3.	Pengadaan Buku Pelajaran	
	A. SD/MI 21.084 x 2 x 20.000	843.360.000
	B. SMP/MTs 9.915 x 8 x 20.000	1.586.400.000
		2.429.760.000
4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	11.083.280.000
	Total Kebutuhan Belanja	43.686.246.500

Sumber : Data Diolah

Jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang untuk bidang pendidikan, selama tahun 2009 total belanja pendidikan berjumlah Rp 177.361.098.893 atau 25,65% dari total belanja pada

APBD 2009 yang berjumlah Rp 691.361.505.377 termasuk dana BOS dan dana tugas pembantuan, ternyata jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan telah mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja pada tingkat pendidikan dasar sembilan tahun, tetapi dalam urusan wajib pendidikan yang akan dilaksanakan bukan hanya untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun saja tetapi ada juga program pendidikan anak usia dini, program pendidikan menengah dan program pendidikan non formal. Untuk memenuhi target pencapaian kualifikasi guru SD/MI dan SMP/MTs menjadi S1, diperlukan dana Rp 3.213.000.000 setiap tahunnya dengan asumsi bahwa jumlah guru yang ditingkatkan kualifikasinya menjadi S1 berjumlah 20% dari jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang ada. Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2009 pemerintah tidak ada mengalokasikan untuk kegiatan ini. Dalam hal peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.114.519.967, dengan anggaran tersebut dalam waktu 2 tahun maka akan tercapai SPM.

Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan buku, anggaran yang diperoleh dari dana BOS BUKU, jika dibandingkan dengan kebutuhan pengadaan buku untuk mencapai SPM maka alokasi anggaran yang diperoleh dari BOS baru memenuhi 25% dari kebutuhan belanja.

Pada APBD 2009 terdapat belanja pelayanan publik sejumlah Rp 4.809.695.000 yang dialokasikan untuk kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan hari pendidikan nasional, penetapan angka kredit jabatan fungsional untuk tenaga pendidik, kompetisi pendidikan, penyediaan beasiswa pendidikan, pengembangan

jaringan TI dan komunikasi pendidikan, pengadaan buku raport pendidikan dan peningkatan penggunaan dana BOS.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Dari kinerja pendidikan Kota Tanjungpinang tahun 2009 untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs dengan indikator APK, APM dan angka partisipasi sekolah angka terendah berada pada kecamatan Tanjungpinang Kota. Dan kinerja pendidikan yang tertinggi pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs untuk indikator tersebut berada pada kecamatan Tanjungpinang Timur.
- b. Dari 9 indikator SPM, ada 4 indikator SPM yang belum terpenuhi pada Kota Tanjungpinang yaitu APM baik untuk tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, pemenuhan sarana dan prasarana untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs yaitu perpustakaan, lapangan olahraga dan UKS, kualifikasi guru S1 untuk kedua jenjang pendidikan tersebut dan memiliki buku pelajaran yang lengkap bagi setiap siswa.
- c. Setelah dilakukan mapping antara program dan kegiatan pendidikan yang telah dilakukan selama tahun 2006-2009 dengan target pencapaian yang harus dipenuhi berdasarkan SPM, maka dari 9 indikator yang harus dipenuhi, orientasi program dan kegiatan berfokus pada 6 indikator yaitu APM 95% untuk SD/MI 90% untuk SMP/MTs, pemenuhan sarana dan prasarana, memiliki tenaga kependidikan non guru, pemenuhan jumlah kebutuhan guru, jumlah siswa perkelas 30-40 siswa, penurunan angka putus sekolah dan peningkatan persentase siswa melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Pemenuhan sarana dan prasarana masih terkendala pada fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan, lapangan olah raga dan UKS, sedangkan

pemenuhan jumlah kebutuhan guru masih terkendala pada jumlah guru yang berkualifikasi S1. Sedangkan 2 indikator lainnya yang termuat didalam SPM, berupa peningkatan kualifikasi guru menjadi S1 dan pemenuhan kebutuhan buku pelajaran, walaupun telah termuat didalam program dan kegiatan pelayanan pendidikan yang telah dilaksanakan Kota Tanjungpinang selama tahun 2006-2009, tetapi belum mendapatkan perhatian yang serius dan diiringi alokasi anggaran yang memadai.

- d. Untuk memenuhi target pencapaian kualifikasi guru SD/MI dan SMP/MTs menjadi S1, diperlukan dana Rp 3.213.000.000 setiap tahunnya dengan asumsi bahwa jumlah guru yang ditingkatkan kualifikasinya berjumlah 20% dari jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang ada. Dalam pencapaian SPM untuk APM maka diperlukan dana sebesar Rp 26.960.206.500, dan untuk pengadaan buku diperlukan dana sebesar Rp 2.429.760.000. Dalam hal peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.114.519.967, dengan anggaran tersebut dalam waktu 2 tahun maka akan tercapai SPM.

5.2 Saran

- a. Untuk percepatan pencapaian APM pemerintah harus tetap menganggarkan dana untuk kegiatan penyediaan dana pembebasan biaya pendidikan dasar 9 tahun yang telah dilaksanakan pada tahun sebelum 2009 .
- b. Dalam mengalokasikan anggaran diprioritaskan pada indikator SPM yang belum tercapai. Ada dua program yang perlu diprioritaskan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan yaitu peningkatan kualifikasi guru menjadi S1 dan pemenuhan buku pelajaran bagi siswa.

- b. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, yang harus di prioritaskan oleh pemerintah adalah pemenuhan sarana perpustakaan karena dengan tersedianya perpustakaan akan sangat membantu bagi siswa yang kurang mampu dan dengan adanya perpustakaan akan menumbuhkan minat suka membaca bagi para siswa. Selain itu juga yang harus diperhatikan dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah adalah tersedianya UKS dan lapangan olah raga.
- c. Adanya suatu standar analisa belanja atau analisis standar belanja dalam menghitung belanja untuk kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM dibidang pendidikan.

5.3 Keterbatasan

- a. Dalam menghitung angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi menggunakan asumsi bahwa seluruh siswa yang melanjutkan ke SMP/MTs atau ke SMA/MA/SMK melanjutkan sekolah di wilayah Kota Tanjungpinang.
- b. Tidak dapatnya dihitung jumlah rasio buku-siswa karena keterbatasan data tentang jumlah buku yang tersedia di sekolah.
- c. Belum adanya standar analisa belanja atau analisis standar belanja yang dimiliki Kota Tanjungpinang dalam menghitung belanja untuk kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM.

5.4 Implikasi Hasil Penelitian

Untuk memperkecil gap (kesenjangan) yang terjadi, antara SPM pendidikan dasar dengan ketercapaiannya pemerintah Kota Tanjungpinang perlu mengambil langkah kebijakan, berupa :

a. Realokasi Anggaran

Kemampuan pemerintah daerah terutama dinas pendidikan, pemuda dan olah raga dalam menetapkan dan memilih program atau kegiatan yang akan dilaksanakan akan mempengaruhi didalam kinerja pendidikan. Melakukan analisis terhadap program atau kegiatan yang diusulkan dan dilaksanakan menjadi sangat penting agar program atau kegiatan tersebut tepat sasaran. Ketepatan suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan akan berpengaruh besar terhadap alokasi anggaran yang dibutuhkan. Berdasarkan analisis gap (kesenjangan) anatar kinerja pelayanan dan SPM maka prioritas anggaran seharusnya lebih diarahkan pada percepatan pencapaian APM (Angka Partisipasi Murni) baik ditingkat SD/MI maupun di tingkat SMP/MTs, peningkatan kualifikasi guru, pengadaan buku pelajaran, serta pemenuhan sarana dan prasarana sekolah berupa perpustakaan, lapangan olah raga dan UKS.

b. Percepatan Peningkatan APM

Dari hasil pembahasan didapat bahwa angka APM baik tingkat SD/MI dan MTs masih berada dibawah target SPM. Untuk itu pemerintah perlu mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kegiatan penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang mampu dan penyediaan dana pembebasan biaya pendidikan dasar sembilan tahun. Karena dari gap (kesenjangan) APM per kecamatan, angka terendah berada pada kecamatan yang penduduknya miskin.

c. Pemberdayaan Guru

Hasil dari analisis kebutuhan guru ternyata pada tingkat SD/MI terdapat kelebihan jumlah guru, dimana dari kelebihan tersebut banyak yang tidak

memenuhi kualifikasi S1. Begitu juga untuk tingkat SMP/MTs, ternyata jumlah mengajar guru dibawah jam wajib mengajar 18 jam/minggu hal itu menunjukkan bahwa ketersediaan guru belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu memanfaatkan guru yang ada secara optimal, mendistribusikan guru-guru yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada agar tercipta pemerataan guru dalam hal latar belakang bidang studi serta melakukan percepatan peningkatan kualifikasi guru menjadi S1.

d. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sekolah

Berdasarkan hasil analisis pemenuhan sarana dan prasarana, ternyata masih ada sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti perpustakaan, lapangan olah raga dan UKS. Untuk mengatasi masalah tersebut maka orientasi pembangunan yang dilaksanakan harus mengarah pada pemenuhan fasilitas pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2008. *Pengalokasian Belanja Fisik Dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris Atas Determinan dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Naskah Akademik Standar Biaya Pendidikan*. BSNP, Jakarta.
- Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Tanjungpinang. 2009. *Profil Pendidikan Kota Tanjungpinang*. Tanjungpinang.
- Elfindri. 2001. *Ekonomi SDM*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- _____. 2006. *Siapa Pintar Siapa Bodoh*. Visimedia, Cibubur.
- Fattah, Nanang. 2002. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Fatimah. 2009. *Analisa Kebijakan Belanja Dan Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Dinas kesehatan Kota Payakumbuh*. Tesis Magister Sains Universitas Andalas, Padang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2004. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Periana. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Isdijoso, Brahmantio, Tri Wibowo. 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 2002, Jakarta.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. 2004, Jakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Basis Perekonomian Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Oentarto. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Samitra Media Utama, Jakarta.
- Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tanjungpinang*. 2009. Tanjungpinang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Depdagri RI, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 2007, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2008, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2005, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005, Jakarta.
- Prasojo Eko, Teguh Kurniawan, Azwar Hasan. 2005. *Efisiensi Anggaran Sebagai Factor Kunci Keberhasilan dalam Program Inovasi Di Kabupaten Jembrana*. Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Vol. V, No. 2, Maret – Agustus 2005, Malang.
- Simanjutak, Guntur. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. DEPUTI IV BPKP, Jakarta.
- Steer, Andrew. 2005. *Analisis Pengeluaran Publik Papua Sebuah Tinjauan Umum*. World Bank Publication.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA/2002 Tertanggal 8 Juli 2002 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia mengenai Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 2002, Jakarta.

Tayomah Nina, Syaikhu Usman. 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pendidikan Dasar*. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004, Jakarta.



Lampiran 1. Jumlah Sekolah, Siswa, Kelas Dan Guru SD/MI Kota Tanjungpinang Tahun 2009

No	Kecamatan	Sekolah			Guru			Kelas			Siswa		
		SD	MI	SD + MI	SD	MI	SD + MI	SD	MI	SD + MI	SD	MI	SD + MI
1	Tanjungpinang Kota	12	0	12	228	0	228	108	0	108	2.827	0	2.827
2	Tanjungpinang Barat	16	1	17	339	26	365	160	6	166	5.161	59	5.220
3	Tanjungpinang Timur	15	0	15	450	0	450	208	0	208	6.781	0	6.781
4	Bukit Bestari	18	2	18	438	36	474	202	21	223	6.021	600	6.621
	Jumlah	61	3	64	1.455	62	1.5.17	678	27	705	20.790	659	21.449

Lampiran 2. Jumlah Sekolah, Siswa, Kelas Dan Guru SMP/MTs Kota Tanjungpinang Tahun 2009

No	Kecamatan	Sekolah			Guru			Kelas			Siswa		
		SMP	MTs	SMP + MTs	SMP	MTs	SMP + MTs	SMP	MTs	SMP + MTs	SMP	MTs	SMP + MTs
1	Tanjungpinang Kota	5	0	5	87	0	87	32	0	32	955	0	955
2	Tanjungpinang Barat	5	0	5	145	0	145	55	0	55	2.050	0	2.050
3	Tanjungpinang Timur	6	0	6	169	0	169	69	0	69	2.602	0	2.602
4	Bukit Bestari	7	2	9	216	51	267	88	16	104	3.109	541	3.650
	Jumlah	23	2	25	617	51	668	244	16	260	8.716	541	9.257

Lampiran 4. Program Bidang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kota Tanjungpinang Tahun 2007.

Sasaran	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
Perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik	Wajib belajar pendidikan 9 tahun	1. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	2.000.000.000	1.660.179.450
		2. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	11.131.120.000	11.051.793.750
		3. Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islami tingkat SD dan SMP	100.385.000	99.385.000
		4. Penyelenggaraan paket B dan setara SMP	76.380.000	72.708.200
		5. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	670.900.000	670.900.000
		6. Penyediaan dana pembebasan biaya pendidikan dasar 9 tahun	1.574.965.000	1.525.190.000
		7. Penyelenggaraan dan pembinaan olimpiade siswa SD/SMP.	237.500.000	235.500.000
		8. Penyelenggaraan dan pembinaan pekan olahraga dan seni	287.185.000	218.040.000
		9. Penyelenggaraan UAS dan UAN	944.701.000	939.601.000

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang 2007.



Lampiran 3. Program Bidang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kota Tanjungpinang Tahun 2006.

Sasaran	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
Perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik	1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana	1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana SLTP	2.195.512.000	1.703.578.100
		2. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana SD	2.953.883.400	2.587.889.200
	2. Peningkatan mutu pendidikan dasar	3. Pengadaan buku teks mata pelajaran/bahan pembelajaran	1.341.945.000	1.146.628.000
		4. Pemilihan siswa berprestasi tingkat Kota Tanjungpinang	15.000.000	14.990.000
	3. Pembinaan kualifikasi guru	5. Penyusunan data pendidikan	25.751.400	25.751.400
		6. Kegiatan gugus dan MGMP	62.795.900	61.795.000
		7. Seleksi/pemilihan guru berprestasi	30.000.000	28.800.000
		8. Penetapan angka kredit jabatan fungsional guru	45.880.000	45.680.000
		9. Pelatihan KBK	60.585.000	59.783.000
		10. Penulisan karya ilmiah	48.000.000	46.451.700
		11. Porseni SD	97.000.000	91.691.500
		12. Pelatihan penciptaan tari bagi guru kesenian SMP/MTs	47.620.000	46.551.200
	4. Pembinaan tenaga kependidikan dan kebudayaan	13. Pengadaan alat kesenian untuk SD/SMP/SMA	80.000.000	79.160.000
		14. Pentas pelajar SMP/SMA	55.902.000	55.842.000
		15. Pelaksanaan POBDA SMP dan SMA	107.000.000	103.370.200
		16. Peningkatan kualifikasi guru SD program S1 PGSD	165.000.000	158.509.800
		17. Pelatihan teknis futsal	59.540.200	58.925.000
		18. Penciptaan dan sosialisasi senam budaya seni gurindam	43.648.600	40.320.400
		19. Pelatihan guru agama pembina rohani Islam SMP/MTs, SMA/MA	72.800.000	58.118.000
		20. Peningkatan sarana dan prasarana SD/MI	747.110.000	746.294.300
	5. Pendampingan dana DAK	21. Dana operasional tim TTK proses perluasan SLTP	50.000.000	44.465.000
		22. Lomba mata pelajaran SMP	12.500.000	12.496.000
	6. Peningkatan & Pembinaan PLS	23. Penyelenggaraan paket B	10.000.000	10.000.000
		24. Ujian nasional paket B	45.000.000	0

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang 2006.

Lampiran 5. Program Bidang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kota Tanjungpinang Tahun 2008.

Sasaran	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
Perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik	Wajib belajar pendidikan 9 tahun	1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	115.790.000	11.776.000
		2. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	106.240.000	100.766.400
		3. Pelatihan penyusunan kurikulum	105.235.000	39.789.500
		4. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	11.072.130.000	10.988.735.000
		5. Penyelenggaraan paket A dan setara SD	70.000.000	29.211.500
		6. Penyelenggaraan paket B dan setara SMP	80.000.000	72.062.500
		7. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	28.205.000	28.062.800
		8. Pengembangan Materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	101.223.000	74.842.000
		9. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	593.565.000	569.065.000
		10. Penyediaan dana pembebasan biaya pendidikan dasar 9 tahun	1.578.965.000	1.564.880.000
		11. Penyelenggaraan dan pembinaan olimpiade siswa SD/SMP.	106.245.000	105.902.100
		12. Penyelenggaraan dan pembinaan pekan olahraga dan seni	211.260.000	210.652.700
		13. Penyelenggaraan UAS dan UAN	1.130.696.000	1.127.106.100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang 2008.

Lampiran 5. Program Bidang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kota Tanjungpinang Tahun 2008.

Sasaran	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi
Perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik	Wajib belajar pendidikan 9 tahun	1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	115.790.000	11.776.000
		2. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	106.240.000	100.766.400
		3. Pelatihan penyusunan kurikulum	105.235.000	39.789.500
		4. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	11.072.130.000	10.988.735.000
		5. Penyelenggaraan paket A dan setara SD	70.000.000	29.211.500
		6. Penyelenggaraan paket B dan setara SMP	80.000.000	72.062.500
		7. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	28.205.000	28.062.800
		8. Pengembangan Materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	101.223.000	74.842.000
		9. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	593.565.000	569.065.000
		10. Penyediaan dana pembebasan biaya pendidikan dasar 9 tahun	1.578.965.000	1.564.880.000
		11. Penyelenggaraan dan pembinaan olimpiade siswa SD/SMP.	106.245.000	105.902.100
		12. Penyelenggaraan dan pembinaan pekan olahraga dan seni	211.260.000	210.652.700
		13. Penyelenggaraan UAS dan UAN	1.130.696.000	1.127.106.100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang 2008.